UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Disusun oleh:

Wisnu Kurniawan

19/443096/SP/28960

Dibimbing oleh:

Dr. Muhammad Rum, IMAS

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2023

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji
Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Nama	: Wisnu Kurniawan
No. Mahasiswa	: 19/443096/SP/28960
Judul Skripsi	: Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Tanggal Ujian	: 22 Desember 2023
Tempat	: R. Sidang Hubungan Internasional

Tim Penguji

Ketua Tim/ Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Rum, S.I.P., I.M.A.S
111198507201201101

Penguji I

Dr. Ririn Tri Nurhayati, S.I.P., M.Si., M.A.
19740321 199903 2 001

Penguji II

Yulida Nuraini Santoso, S.I.P., M.Sc.
111198902202201201

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pernyataan Bebas Plagiasi

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Wisnu Kurniawan
NIM	: 19/443096/SP/28960
Tahun Terdaftar	: 2019
Program Studi	: Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik disuatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/ lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Januari 2024



Wisnu Kurniawan

19/443096/SP/28960

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Halaman Persembahan

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan untuk hidup di dunia ini. Atas bantuan tersebut saya dapat menyelesaikan studi saya di program studi ilmu hubungan internasional. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah bersusah payah membiayai pendidikan saya dari awal hingga akhir baik itu dukungan material ataupun moril. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen di program studi saya yang telah mengajarkan saya mengenai banyak hal yang sebelumnya tidak saya ketahui. Terutama, saya ucapkan kepada dosem pembimbing skripsi saya yaitu Mas Rum yang telah membimbing saya dari awal penulisan skripsi hingga akhir. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjadi teman saya hingga saat ini dan akan tetap setelah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman prodi, fakultas, universitas, dan kkn. Tanpa kalian semua, tidak akan ada momen menarik dari perkuliahan saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terutama kepada DEMA FISIPOL yang telah membuat saya menjadi lebih manusia lagi. Tidak lupa juga terima kasih kepada adikku yang tidak terlalu menuntut kepada kakaknya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang teramat besar kepada siapapun yang telah menemani perjalanan akademik saya selama berkuliah.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Daftar Isi

Halaman Pengesahan i
Pernyataan Bebas Plagiasi ii
Halaman Persembahan iii
Daftar Isi iv
Istilah Penting v
Abstrak vi
BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tinjauan Literatur 2
1.3 Pertanyaan Penelitian 4
1.4 Kerangka Konseptual 4
1.5 Argumentasi Utama 7
1.6 Metode Penelitian 7
1.7 Sistematika Penulisan 8
BAB II Norma dan Nilai Demokrasi Sosial Membentuk Struktur Ekonomi-politik Jerman yang Membuka Peluang Terhadap Eksistensi St. Pauli FC 9
2.1 Demokrasi Sosial Sebagai Norma dan Nilai 9
2.2 Implementasi Sosial Demokrasi di Pemerintahan Jerman 11
2.3 Ekonomi Campuran sebagai Struktur Ekonomi-Politik Jerman: *Collective Bargaining* dan *Public Owned Corporation* 13
2.4 Peraturan 50%+1 Sebagai Hasil Iklim Politik-ekonomi Jerman yang Inklusif 15
BAB III St. Pauli FC Sebagai Sarana Representasi Budaya Masyarakat Distrik St. Pauli 18
3.1 Masyarakat Hamburg: Dua Kelompok Sosial Berbeda di Kondisi Geografis yang Berdekatan 18
3.2 Eksistensi St. Pauli FC Hingga Berakhirnya Perang Dunia Kedua 19
3.3 Subkultur di St. Pauli dan Upaya Representasi Masyarakat Melalui Sepak Bola 21
3.4 Hegemoni Pasar Bebas di Sepak Bola Eropa 25
3.5 Bagaimana Kontra Hegemoni Terjadi di St. Pauli FC 27
BAB IV Penutup 30
4.1 Kesimpulan 30
4.2 Kontribusi Terhadap Hubungan Ilmu Internasional 31
Referensi 32

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Istilah Penting

APO	: Oposisi Ekstra-parlemen
Betriebliche Mitbestimmung	: Penentuan Bersama Perusahaan
Bundesliga	: Liga Jerman
Bundesliga Satzung	: Statuta Liga Jerman
Bundesrat	: Dewan Federal
Bundestag	: Parlemen Federal
CDU	: Partai Kristen Demokratik Jerman
Collective Bargaining	: Perundingan Bersama
CSU	: Partai Kristen Sosial Jerman
DFB	: Asosiasi Sepak Bola Jerman
DFL	: Asosiasi Liga Sepak Bola Jerman
DGB	: Konfederasi Serikat Buruh Jerman
Emergency Law	: Undang-Undang Kedaruratan Jerman
FC	: Klub Sepak Bola
FIFA	: Asosiasi Sepak Bola Internasional
Große Koalition	: Koalisi Besar
Grundgesetz	: Undang-Undang Dasar Jerman
Karolinenviertel	: Daerah Utara Hamburg
Leitlinien	: Pedoman
Lumpenproletariat	: Kelas Pekerja Tanpa Kesadaran Kelas
Merchandise	: Barang Komoditas Klub
Public Ownership	: Peraturan Kepemilikan Publik Jerman
Reeperbahn	: Pusat Hiburan Malam St. Pauli
RFJ	: Republik Federal Jerman
Sankt Pauliner	: Nama Pendukung St. Pauli FC
Schanzenviertel	: Daerah Selatan Hamburg
SPD	: Partai Demokrasi Sosial Jerman
Sponsorship	: Sponsor
TVG	: Undang-Undang Perundingan Bersama
Ultra	: Pendukung Bergaya Ultras
Ultras	: Budaya Pendukung Sepak Bola Italia pada 1960-an
Unternehmen Mitbestimmung	: Partisipasi Perusahaan
Wirtschaftswunder	: Keajaiban Ekonomi Jerman

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Abstrak

St. Pauli FC menjadi klub yang terkenal karena sangat inklusif terhadap keberagaman pendukungnya. Meskipun tidak berlaga pada kasta tertinggi di Liga Jerman, klub ini tetap eksis melalui pandangan humanismenya. Pandangan berbeda tersebut yang membuat klub ini memiliki pembeda terhadap klub-klub konvensional lainnya, terutama di Eropa. Inklusifitas St. Pauli FC tidak serta merta terbentuk begitu saja, tetapi ada proses yang panjang mengenai representasi kelas masyarakat di distrik tersebut. Berawal dengan distrik tersebut merupakan kawasan kelas pekerja pada abad ke sembilan belas hingga kelompok otonom yang muncul pasca perang dunia kedua. Melalui representasi budaya yang ada di distrik tersebut, klub dan pendukung dari St. Pauli FC mencoba menentang budaya induk yang ada di sepak bola Eropa. Mereka melakukannya dengan cara mengambil alih kepengurusan klub secara kolektif, tidak ada posisi dan kekuatan yang terpusat dalam pengambilan keputusan klub tersebut. Selaras dengan peraturan 50+1 pada sepak bola Jerman yang memberikan mereka landasan dan wadah bagi masyarakat untuk merepresentasikan diri terhadap sepak bola.

Kata kunci: *St. Pauli FC, Subkultur, Hegemoni, Punk, Sepak bola, Representasi*

Abstract

St. Pauli FC is a club known for being very inclusive of the diversity of its supporters. Despite not competing in the highest caste in the German League, the club still exists through its humanist views. This different view makes this club different from other conventional clubs, especially in Europe. The inclusiveness of St. Pauli FC did not just happen, but there was a long process of class representation in the district. From the district being a working-class area in the nineteenth century to the autonomous groups that emerged after the second world war. Through cultural representations in the district, the club and supporters of St. Pauli FC tried to challenge the master culture of European football. They do so by taking over the management of the club collectively, there is no centralized position and power in the club's decision-making. This is in line with the 50+1 rule in German football which gives them a platform for the community to represent themselves in football.

Keywords: *St. Pauli FC, Subculture, Hegemony, Punk, Football, Representation*

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

St. Pauli FC tidak berkompetisi di kasta tertinggi Liga Jerman, namun klub ini tetap eksis dikarenakan pandangan humanismenya. Mereka menolak rasialisme, fasisme, homophobia, dan seksisme. Mereka beranggapan bahwa lebih baik berada pada liga bawah dibanding mendapatkan sokongan dari kapitalisme untuk tetap eksis di kasta tertinggi; yang secara eksplisit terlihat dari bagaimana koordinasi antara klub dan suporter dalam manajerial klub. Oleh karena itu, suporter St. Pauli FC tidak seperti klub bola lain yang memuja kemapanan atas timnya. Bermula pada dekade 1970 hingga 1980, pendukung St. Pauli tertarik untuk melihat realitas sosial, mulai dari masalah-masalah sosial hingga politik (Haasen, 2018); di saat klub di belahan Eropa lainnya masih berkutat dengan permasalahan rivalitas suporter dan hooliganisme. Dibentuk dengan kesadaran ideologis yang melebihi kehausan akan historis menarik bagi kalangan yang memiliki pemikiran yang sama, klub ini menjunjung tinggi inklusivitas kepada siapapun yang ingin menjadi bagian dari klub, tetapi dengan catatan tidak kontradiktif dengan ideologi klub. Hal ini terlihat dari peraturan bagi pendukung St. Pauli FC yang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang menunjukan kebencian pada siapapun atas dasar suku, ras, agama, ataupun pandangan hidup. Pendukung St. Pauli FC mengenakan identitas bendera tengkorak dengan latar belakang hitam.

Pada lingkup domestik, pendukung St. Pauli FC dapat dijumpai ketika adanya festival musik atau seni di Hamburg. Keterikatan pendukung tidak hanya terhadap sepak bola tetapi juga dengan hal hal seperti kesenian dan advokasi perburuhan. Suporter St. Pauli FC juga tergabung pada Alerta Network, yaitu gerakan anti fasisme internasional (Ahsan dan Faisal, 2018). Suporter ini juga cukup vokal untuk menentang neo-Nazi di Jerman. Tidak hanya dalam ranah domestik, suporter St. Pauli FC juga menjalin ikatan yang kuat dengan pendukung klub sepak bola yang memiliki kemiripan ideologi, seperti Hapoel Tel Aviv atau Glasgow Celtic.

Gerakan yang dilakukan oleh St. Pauli FC adalah gerakan yang menarik, karena adanya poros baru yaitu olahraga, khususnya sepak bola, sebagai sarana komunikasi. Olahraga yang kerap dicap sebagai acara hiburan, nyatanya dapat diubah menjadi wadah menyuarakan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

aspirasi, seperti yang St. Pauli FC dan pendukungnya lakukan. Kesadaran gerakan yang muncul tidak hanya mengenai isu ras atau pekerjaan saja dan melampaui itu. Gerakan yang St. Pauli FC lakukan dapat merangkum faktor-faktor menjadi gerakan yang progresif dan menuntut perubahan ke arah inklusivitas. Ideologi yang sudah tertanam di konstitusi klub menjadikannya landasan sekaligus wadah bagi masyarakat luas yang memiliki kesamaan pemikiran. Inklusivitas yang ditawarkan membuat pendukung tidak hanya berasal dari lokal Hamburg, tetapi juga negara-negara lain yang bersifat transnasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membedah bentuk relasi pendukung St. Pauli FC dengan kondisi sosial di Jerman yang ditransformasikan menjadi gerakan sosial progresif beserta keberlangsungan klub ini. Penelitian ini juga membedah mengapa St. Pauli FC dapat bertahan atas komersialisasi sepak bola modern ini. Signifikansi penelitian ini terhadap studi hubungan internasional adalah neoliberalisme yang telah mengooptasi dan mengomodifikasi berbagai sektor, karena St. Pauli FC menentang atas standardisasi kemapanan sebuah klub. Gerakan sosial yang muncul dalam dinamika St. Pauli FC dan pendukungnya merupakan bentuk respons atas komodifikasi.

1.2 Tinjauan Literatur

Sepak bola pada awalnya merupakan permainan yang dianggap kasar dan tidak teratur yang dimainkan oleh kelompok buruh di jeda pekerjaan mereka (Goulstone, 2000). Menurut J. Walvin dalam *The People's Game* (2014), dari abad ke-13 hingga 19, sepak bola merupakan permainan tak tentu, waktu yang tidak ditentukan, dan dapat menggunakan peraturan lokal. Dalam pandangan Walvin (2014), bermain bola dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang dadakan atau "ritual", dengan kata lain tidak pernah dikejar sebagai olahraga kompetitif dengan pertandingan yang diatur secara formal. Hingga pertengahan abad ke-19, sepak bola diadopsi oleh sekolah formal dan dijadikan sebagai ajang kompetisi (Walvin, 2014). Peralihan ini membuat terciptanya berbagai klub sepak bola baru. Kota pelabuhan yang memiliki demografi buruh seperti yang ada di Merseyside dan Manchester menjadi penting untuk dilihat dalam aspek pemeliharaan animo pendukung klub yang ada (Totten, 2018). Para pendukung klub datang ke stadion di luar hari kerja sebagai sarana rekreatif, walaupun pada akhirnya justru menjadi masalah kebanggaan atas klub daerah yang mereka tinggali.

Sepak bola dapat menjadi sarana inklusi ataupun bahkan eksklusi sosial. Di masyarakat postmodern, sepak bola menjadi salah satu dari sedikit platform komunikasi yang tersisa;

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

platform yang tidak bersinggungan langsung dengan pembuatan kebijakan di negara. Membuat lebih leluasa untuk melakukan advokasi dari luar sistem. Sepak bola dapat menjadi wadah tentang subjektifitas rasa memiliki. Pendukung St. Pauli FC dapat diidentifikasi sebagai komunitas yang jelas dalam pengaturan yang lebih luas dari bentuk masyarakat *Gesellschaft* (asosiasi); sebagian besar bukan hal yang langsung ada tetapi hal yang dibangun dan buatan (Daniel dan Kassimeris, 2013). Komunikasi menjadi salah satu hal yang dapat membangun rasa keterikatan tersebut. Komunikasi tidak hanya mengenai bagaimana suatu informasi disampaikan, tetapi juga menyinggung hal-hal sosial seperti politik. Komunikasi politik pada akhirnya menjadi suatu proses, bagian yang dipengaruhi oleh budaya politik dalam masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi politik juga membangun, membangun, dan mewariskan budaya politik, mengenai struktur dan pola pesannya (Perdana, 2016). Budaya politik yang St. Pauli FC miliki itu lantas ditransformasikan melalui komunikasi politik di dalam keolahragaan dan gerakan sosial.

St. Pauli FC dikatakan hanya akan menjadi utopia bagi sebuah klub yang dapat menjadi wadah representatif. Griggs (2012) dalam artikelnya menjelaskan mengenai untuk melihat mengenai gerakan sosial yang ada pada pendukung St. Pauli FC melalui identitas perlawanan; di mana ide-ide dan identitas resisten dari apa yang disebut subkultur alternatif ini ditempatkan dalam status sosial yang lebih rendah daripada cita-cita normatif dari budaya yang lebih luas (Griggs, 2012). Penyanggahan atas ideologi alternatif yang dipegang oleh St. Pauli FC ini menggunakan modernisasi sebagai terma atas dinamika kultur politik yang ada. Apakah St. Pauli FC akan tetap berpegang pada pemikirannya ketika mereka dihadapkan kepada masalah finansial, promosi liga, dan kemewahan yang seringkali diartikan oleh klub-klub besar di Eropa.

Dalam tulisan *Grass-roots football, autonomous activity and the forging of new social relationships* oleh Kennedy (2017) yang menyatakan bahwa sepak bola dapat dimiliki oleh semuanya. Terdapat mekanisme yang dapat membuat sebuah tim dapat ikut ke pusaran neoliberalisme sepak bola dengan mengikuti serangkaian verifikasi standar atas klub untuk dapat mengikuti liga secara resmi. Tetapi sebuah klub juga dapat memainkan sepak bola tanpa angan-angan atas prestasi yang harus dicapai. Tujuan utama mereka adalah memainkan sepak bola secara akar rumput dan menjalin hubungan dengan rekan-rekan yang menyukai permainan ini. Meskipun tujuan politis mereka tidak seradikal klub-klub seperti St. Pauli FC, Glasgow Celtic FC atau beberapa klub progresif lainnya, eksistensi mereka sudah merupakan kritik terhadap standarisasi atas klub sepak bola secara umum. Menciptakan kemungkinan sistem

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

penyediaan kebutuhan yang tidak mengasingkan beberapa pihak. Tulisan ini lekat kaitannya dengan eksistensialisme terhadap kaitannya dalam hal sepak bola.

Merujuk ke tulisan lain yang membahas budaya Ultra. Ultra merupakan pendukung fanatik yang memiliki identitas tertentu seperti pakaian hitam dan kembang api di dalam stadion telah berkembang yang cukup lama di Jerman. Hal ini berkembang terlebih dahulu di Italia pada tahun 1960-an yang kemudian masuk ke Jerman pada 1980-an. Budaya ini masuk dengan linimasa yang selaras ketika kebangkitan masyarakat punk-otonom di distrik St. Pauli. Brandt (2015) dalam tulisannya berargumen bahwa kelompok Ultra terbentuk pada awalnya untuk melawan kapitalisme sepak bola. Tetapi, kemudian disebutkan bahwa terjadi pergeseran fokus perlawanan oleh Ultra tersebut. Negara yang sering kali mencampuri urusan keolahragaan menjadi target bagaimana hubungan kelompok Ultra dan kepolisian atau aparat selalu tidak baik. Hal ini juga dapat terlihat pada hubungan St. Pauli FC dengan kepolisian atau pemerintah yang tidak akur. Menjadi kacamata penting dalam melihat konflik pendukung sepak bola terhadap pemerintah.

Beberapa aspek penting mengenai motivasi pendukung terhadap keberlangsungan pergerakan mereka telah dijelaskan oleh beberapa artikel di atas. Dimulai dari pendukung berasal dari kelas pekerja yang sama, identitas yang termarginalkan, aktivitas otonom akar rumput, dan sarana perlawanan terhadap rezim. Menjadi bahan untuk dapat menganalisa apa yang terjadi di St. Pauli FC secara lebih mendalam, dikarenakan klub ini mengalami berbagai masa mulai dari perburuhan, identitas subkultur, hingga kontra-hegemoni neoliberalisme sepak bola. Pendukung radikal dari Ultra Sankt Pauli turut melawan eksistensi dari aparat di Jerman. Menjadi penting bahwa Jerman sebagai pemerintahan memiliki nilai dan norma yang turut membantu St. Pauli FC untuk eksis melalui kebijakan yang mereka terbitkan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengapa St. Pauli FC sebagai klub sepak bola dapat tetap eksis pada era neoliberalisasi sepak bola di Jerman?

1.4 Kerangka Konseptual

Neoliberalisme

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Neoliberalisme mengutamakan pasar bebas tanpa adanya intervensi pemerintah di dalamnya. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah biasanya akan menjadi penghambat pasar bebas dan menimbulkan ketidakefisienan. Pasar yang bebas diharapkan akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang maksimal; tugas dari pemerintah adalah untuk memproteksi masyarakat dengan pembuatan peraturan atau undang-undang alih-alih mengintervensi pasar bebas (Hayek, 1960). Neoliberalisme yang dicetuskan oleh Friedrich Hayek menekankan pada tiga hal, yaitu pasar bebas, terbatasnya intervensi oleh pemerintah, dan kebebasan setiap individu. Meskipun dikritik karena kerap kali menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan, teori ini sangat berpengaruh dalam kondisi sosial masyarakat saat ini.

Dalam konteks sepak bola, klub-klub sepak bola semakin bergantung pada pendapatan komersial seperti hak siar televisi, sponsorship, dan merchandise untuk dapat mendanai keberlangsungan klub berjalan. Hal ini memaksa beberapa klub untuk fokus terhadap pencarian keuntungan dari pada aspek olahraga dan sosial dari sepak bola.

Subkultur

Landasan konseptual yang akan digunakan salah satunya adalah subkultur. Dick Hebdige mendefinisikan subkultur sebagai upaya untuk menentang kebiasaan; dalam hal ini adalah menentang budaya yang ada atau disebut juga budaya induk (Hebdige, 2012). Subkultur ini tetap menjadi bagian dari budaya, tetapi berada di tempat yang lain dari suatu lingkup kebudayaan. Untuk menunjukan suatu budaya dalam subkultur, cara-cara yang sering digunakan adalah melalui simbolisme yang nyentrik dan berlawanan dengan hal yang dianggap umum. Oleh karena itu subkultur sering dianggap negatif oleh masyarakat karena kritikannya terhadap realita sosial yang dominan.

Ideologi ini berasal dari persepsi manusia tentang pengalaman hidup dari keberadaan manusia itu sendiri. Pengalaman hidup yang dirasakan ini memiliki hubungan secara khusus dengan dunia nyata. Apa yang diwakili dalam ideologi adalah hubungan mereka dengan pengalaman kondisi keberadaan mereka. Oleh karena itu dapat dikatakan pula ideologi memenuhi wacana sehari-hari dalam bentuk akal sehat (Hebdige, 2012). Secara umum, kecenderungan subkultur kohesif berkembang di dalam kelas bawahan. Ekspresi subkultur adalah salah satu cara yang ditemukan oleh individu yang tertindas untuk mengatasi tekanan dari keberadaan mereka yang termarginalkan, dan dalam menegosiasikan keberadaan kolektif

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

mereka. Subkultur dapat dicirikan sebagai pemusatan pada aktivitas, nilai, dan penggunaan barang dan ruang tertentu, yang membedakannya dengan cara tertentu yang signifikan dari budaya induk yang lebih luas. Empat metode ekspresi khusus diidentifikasi sebagai elemen utama gaya subkultur yang masing-masing adalah pakaian, musik, ritual, dan bahasa (Laing, 1978). Elemen-elemen ini dapat dijumpai pada paguyuban suporter St. Pauli FC dalam melakukan gerakan sosial di Jerman.

Hegemony

Teori ini mencoba menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme kekuasaan dan dominasi oleh masyarakat kapitalis dilakukan dengan cara kontrol atas budaya. Gramsci berpendapat bahwa kekuasaan dapat dipertahankan tidak hanya dengan cara kekerasan, tetapi juga budaya yang terbentuk atas konsensus masyarakat dominan terhadap yang didominasi (Gramsci, 1971). Oleh karena itu, hegemoni budaya dapat dikatakan sebagai sebuah proses dominasi kelas sosial dominan yang mencoba mempertahankan dengan sistem nilai dan norma yang dapat diterima oleh masyarakat yang didominasi. Ideologi merupakan hasil dari proses hegemoni tadi. Ideologi yang hegemonik meyakinkan kelas sosial yang didominasi bahwa sistem tersebut dapat menguntungkan mereka.

Proses hegemoni ini merupakan proses yang terus terjadi. Kelas sosial dominan bekerja untuk dapat mempertahankan dominasi mereka, sebaliknya kelas sosial yang didominasi memiliki ruang untuk melawan dominasi tersebut dengan menciptakan budaya-budaya baru dan membuat hegemoni mereka sendiri. Gramsci berpendapat bahwa kontra-hegemoni hanya dapat muncul dari dalam masyarakat sipil, yaitu organisasi dan lembaga non-negara. Negara, sebagai perwujudan tatanan dominan, terlalu berkuasa untuk ditantang secara langsung. Sebaliknya, gerakan kontra-hegemoni pertama-tama harus membangun basis dukungan dalam masyarakat sipil dengan mengembangkan ideologi alternatif dan pandangan dunia yang selaras dengan kelas-kelas yang didominasi. Tidak ada jaminan bahwa kelompok-kelompok bawahan akan selalu berhasil menggulingkan tatanan dominan. Namun, teori Gramsci memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami bagaimana perubahan sosial terjadi dan bagaimana kelompok-kelompok subordinat dapat menantang *status quo* (Hunt, 2017).

Hegemoni dalam konteks sepak bola dapat dijumpai pada media massa yang dapat digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai yang mendukung hegemoni budaya seperti ide-ide nasionalisme dan patriotisme. Hal lain adalah ketika perusahaan *sponsorship* bersama klub sepak bola itu sendiri digunakan untuk menyebarkan ideologi dari klub itu sendiri yang dapat mengarah kepada inklusivitas atau individualistik dan kapitalisme. Barisan pendukung juga

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

merupakan salah satu alat hegemoni budaya; seperti kultur ultras atau hooliganisme yang memiliki ciri khasnya masing-masing.

1.5 Argumentasi Utama

Eksistensi St. Pauli FC dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan yang terbentuk oleh pemerintah Jerman. Demokrasi sosial yang menjadi landasan nilai dan norma pemerintah Jerman membuka ruang yang lebih inklusif terhadap masyarakat dengan kultur yang beragam. Iklim demokrasi sosial ini menjadi faktor eksternal terhadap keberlangsungan St. Pauli FC.

St. Pauli FC memanajemeni klub sepak bola tersebut dengan cara alternatif yang berbeda dengan klub sepak bola konvensional di Eropa. Identitas budaya yang ada pada masyarakat St. Pauli menjadi bekal kontra-hegemoni terhadap neoliberalisasi sepak bola di Eropa. Representasi masyarakat terhadap St. Pauli FC menjadikan klub ini sebagai wadah aspirasi tetapi juga sarana perlawanan budaya.

1.6 Metode Penelitian

Tulisan ini akan menganalisis mengenai pendukung klub sepak bola St. Pauli FC beserta dengan gerakan progresifnya menggunakan metode studi kasus yang diharapkan dapat membantu untuk memperoleh mengenai pengertian yang mendalam suatu situasi, makna sesuatu, atau objek yang diteliti. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa komponen data untuk dapat memperkuat hipotesis tulisan ini. Data-data tersebut dapat berupa: 1. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Jerman dan asosiasi sepak bola Jerman; 2. Prinsip fundamental yang telah diakui oleh klub; 3. Realitas kultur dan budaya yang ada di distrik St. Pauli dan St. Pauli FC; 4. Identitas yang dapat menjalin hubungan antar pendukung; 5. Jaringan yang terhubung dengan pendukung St. Pauli FC; 6. Desain *merchandise* pendukung.

Posisi ontologis dari tulisan ini adalah kualitatif. Oleh karena itu, studi pustaka lebih tepat untuk digunakan sebagai cara pengumpulan data pada tulisan ini alih-alih menggunakan metode lain. Metode studi pustaka dapat menjangkau sintesis atau intisari dari sebuah realitas sosial yang lebih luas dan kolektif, alih-alih individual yang sering dijumpai dalam subjektifitas metode wawancara. Studi pustaka atau dokumen ini mencari lebih jauh mengenai data-data dari tingkah laku yang dilakukan oleh klub maupun pendukung St. Pauli FC yang dijumpai dalam literatur dan media massa. Teknisnya adalah dengan melakukan pembahasan antara variabel dependen, yaitu eksistensi St. Pauli FC di era neoliberalisme sepak bola, dan independen yaitu

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kondisi politik ekonomi Jerman dan nilai subkultur yang dianut oleh St. Pauli FC dan pendukungnya menggunakan variabel mediasi (*intervening variable)* yang menentukan bagaimana efek yang ditimbulkan mempengaruhi kondisi dari suatu variabel. Variabel mediasi menjadi alat bahwa eksistensi klub dipengaruhi kondisi lain dalam perluasan nilai-nilai subkultur.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan terdiri dari 4 bab dengan rincian sebagai berikut: Bab 1 sebagai pendahuluan yang berisi sebagian latar belakang, pertanyaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 akan mengkaji bagaimana Jerman sebagai pemerintahan memiliki kebijakan yang mengandung nilai dan norma sosial demokrasi berpengaruh terhadap eksistensi St. Pauli FC. Bab 3 akan mengkaji bagaimana masyarakat lokal distrik St. Pauli FC menjadikan klub tersebut sebagai wadah mereka berjejaring yang kemudian menjadikan klub tersebut eksis dengan nilai-nilai alternatif. Bab 4 akan menjelaskan mengenai kontribusi tulisan ini dalam ilmu hubungan internasional, kesimpulan tulisan ini, dan kumpulan referensi yang digunakan dalam tulisan ini.

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB II

Norma dan Nilai Demokrasi Sosial Membentuk Struktur Ekonomi-politik Jerman yang Membuka Peluang Terhadap Eksistensi St. Pauli FC

2.1 Demokrasi Sosial Sebagai Norma dan Nilai

St. Pauli FC menjadi bagian dari objek kebijakan dalam pemerintahan Jerman. Mereka sebagai klub maupun masyarakat secara langsung berada di bawah peraturan kenegaraan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya. Negara ini merupakan salah satu yang menganut ideologi politik demokrasi sosial. Demokrasi sosial yang dimaksud adalah ideologi yang mendukung intervensi sosio-ekonomi yang mempromosikan keadilan sosial dalam sistem pemerintahan liberal-demokratis dan ekonomi campuran; model yang tidak menolak ekonomi kapitalisme tetapi sekaligus merupakan bentuk sosialisme. Dengan kata lain, demokrasi sosial adalah bentuk sosialisme yang berfokus pada rekonsiliasi kapitalisme pasar bebas dengan intervensi negara dan menciptakan perubahan secara bertahap dan damai; hal itu dapat dicapai melalui reformasi bertahap, seperti perluasan program kesejahteraan sosial dan regulasi ekonomi.

Oleh karena itu, penting untuk melihat iklim demokrasi sosial sebagai landasan dan nilai sebuah pemerintahan. Eduard Bernstein dan Edith C. Harvey dalam bukunya *Evolutionary Socialism* berpendapat bahwa prediksi Marx belum terjadi, dan sosialisme dapat dicapai melalui reformasi bertahap alih-alih revolusi. Bernstein dan Harvey (2010) berpendapat bahwa kelas pekerja tidak menjadi semakin miskin di bawah kapitalisme; justru taraf hidup para akan pekerja terus meningkat di bawah sistem tersebut. Kapitalisme mendistribusikan kekayaan dengan cara yang menghasilkan ketidaksetaraan, tetapi juga satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk menghasilkan kekayaan (Bernstein dan Harvey, 1910). Kapitalisme pada dasarnya tidak stabil tetapi juga sulit untuk runtuh. Sistem itu mampu beradaptasi dengan perubahan dan dapat dibuat bekerja untuk kepentingan semua. Oleh karena itu, negara oleh Bernstein dan Harvey (1910) dikatakan bukan instrumen penindasan kelas. Tetapi, negara sebagai instrumen dapat digunakan untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan. Untuk menebus cara kapitalisme menghasilkan ketidaksetaraan, negara harus campur tangan dalam masalah ekonomi dan sosial (Ostrowski, 2018). Hal itu dapat dicapai melalui reformasi bertahap, seperti perluasan program kesejahteraan sosial dan regulasi ekonomi. Sebagai akibat dari asumsi-asumsi ini, kaum sosial demokrat berada dalam kompromi antara kapitalisme pasar bebas dan intervensi negara. Alih-alih seperti komunis, kaum sosial demokrat tidak menganggap kapitalisme bertentangan dengan sosialisme. Keadilan sosial menjadi konsep

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

penting dalam demokrasi sosial, kaum sosial demokrat cenderung menyukai persamaan kesejahteraan dan persamaan kesempatan daripada persamaan hasil. Kesetaraan kesejahteraan berarti mereka menerima bahwa dalam masyarakat kita tidak akan pernah memiliki kesetaraan sejati dan dengan demikian yang harus dituju adalah bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki standar hidup dasar yang sama. Kesetaraan kesempatan berarti bahwa setiap orang harus mulai dari kesempatan yang setara dan memiliki kesempatan yang sama antara satu dengan yang lain tanpa menjadi hambatan bagi sebagian orang lainnya.

Pada dasarnya, nilai-nilai yang dianut oleh kaum sosial demokrat meliputi kebebasan, keadilan atau kesetaraan, dan solidaritas; yang kemudian nilai-nilai ini diaplikasikan pada praktik politik bernegara (Berger, 2014). Praktik tersebut tergambar pada tahun 1875 ketika terbentuknya *Socialist Workers Party of Germany* yang merupakan gabungan dari Serikat *General German Workers Association* yang dipimpin oleh Ferdinand Lassalle dan Partai *Social Democratic Workers Party* yang dipimpin oleh August Bebel dan Wilhelm Liebknecht. Kemudian pada tahun 1890 berganti nama menjadi *Social Democratic Party* (SPD) atau *Sozialdemokratische Partei Deutschlands* yang bertahan hingga sekarang. Sejarah awal partai SPD ditandai oleh konflik internal yang intens antara dua kubu, yaitu revisionis dan marxisme ortodoks. Kaum revisionis yang dipimpin oleh Lassalle dan Bernstein, berpendapat bahwa keadilan sosial dan ekonomi dapat dicapai bagi kelas pekerja melalui pemilihan umum dan pembentukan institusi yang demokratis; dan tanpa perjuangan kelas yang penuh kekerasan melalui revolusi. Sedangkan, kaum marxis ortodoks bersikeras bahwa pemilihan umum dan hak-hak sipil tidak akan menciptakan masyarakat yang benar-benar sosialis dan kelas penguasa tidak akan pernah menyerahkan kekuasaan tanpa perlawanan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami demokrasi sosial sebagai ruang yang inklusif terhadap perbedaan budaya yang ada di Jerman. Demokrasi sosial memiliki makna ganda, yaitu definisi dasar teori demokrasi dan sebutan untuk sebuah aliran politik yang dapat berupa instrumen politik. Meskipun ada banyak hubungan timbal balik antara dua definisi tersebut, kedua definisi tersebut jelas merupakan dua hal yang harus dibedakan. Hal ini karena keduanya memiliki kebutuhan yang berbeda, baik latar belakang normatif maupun peran yang dikandungnya. Selain itu, terdapat perbedaan cara pencapaiannya, teori demokrasi sosial tidak bergantung pada aktor politik tertentu. Namun, penerapannya tentu saja bergantung pada aktor politik yang memperjuangkan program atau kebijakan yang digariskan dalam teori demokrasi sosial. Berbagai aktor politik dapat menggunakan definisi demokrasi sosial sebagai nama program, terlepas dari apakah upaya politik tersebut diwujudkan dan sejauh mana kaitannya dengan teori sosial demokrasi (Meyer, 2005). Pada prinsipnya, demokrasi sosial sebagai model

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ideologis dan demokrasi sosial sebagai partai politik atau aliran selalu memiliki titik temu, tetapi keduanya tidak sama.

Dalam teori demokrasi sosial Thomas Meyer, pertanyaan utamanya adalah sejauh mana hubungan antara demokrasi dan kapitalisme pasar. Demokrasi dan kapitalisme pasar dipahami sebagai dua pilar utama sistem sosial yang ada di pemerintahan Jerman. Menurut Meyer (2005), di satu sisi kapitalisme dan demokrasi saling melengkapi. Dengan demikian, kapitalisme pasar merupakan prasyarat bagi pembentukan dan stabilitas demokrasi. Ketegangan demokrasi akan muncul ketika pasar bebas tidak diatur oleh negara. Meyer (2005) menganalisis secara historis syarat-syarat lahirnya demokrasi dan mengkaji hubungan empiris antara demokrasi dan ekonomi pasar untuk masyarakat modern. Bagi Meyer (2005), demokrasi secara historis seringkali terbentuk setelah atau terkait langsung dengan kebangkitan pasar bebas di Eropa. Demokrasi berhasil didirikan di berbagai negara pada waktu yang berbeda sebagai model masyarakat borjuis. Masyarakat borjuis dipahami sebagai model tatanan ekonomi, sosial, dan politik yang ditujukan untuk menaklukkan otokrasi, menghilangkan hak istimewa berdasarkan garis keturunan, dan memaksa seseorang untuk menyesuaikan diri dari model masyarakat gereja. Metode demokrasi tersebut juga menjamin kemampuan untuk hidup masyarakat dan membatasi kekuasaan negara berdasarkan aturan hukum dan konstitusi yang liberal, serta mengikat kekuasaan negara dengan kehendak warga negara melalui pemilihan umum ataupun pembentukan instrumen perwakilan pada tingkat negara. Instrumen representasi ini penting untuk dilihat bagaimana keterwakilan menjadi aspek penting dalam hubungan bermasyarakat di Jerman.

Meyer dan Turowski (2006) mengungkapkan tiga level bagaimana seharusnya demokrasi sosial berjalan yaitu pada nilai-nilai dasar, hak-hak dasar, dan instrumen. Pada level nilai-nilai dasar yang berupa kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas dijelaskan bagaimana setiap individu berhubungan dengan masyarakat dan bagaimana kehidupan diatur dalam masyarakat (Meyer dan Turowski, 2006). Pada level hak-hak dasar, nilai-nilai dasar tersebut menjadi acuan untuk diciptakan dan diimplementasikan sebagai peraturan yang mengikat, demokratis, dan legal. Pada level instrumen, lembaga sosial dalam bentuk partai politik atau negara didefinisikan sebagaimana dengan fungsinya, di mana negara dan memungkinkan aliansi antar negara untuk memastikan dan menjamin hak dan kebebasan masyarakat atas pelaksanaan hukum.

2.2 Implementasi Sosial Demokrasi di Pemerintahan Jerman

Dalam konteks kondisi politik-ekonomi di Jerman pasca Perang Dunia II, sejarah Republik Federal Jerman dapat dilihat sebagai kisah sukses demokrasi sosial. Setelah rezim

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Nazi, banyak keraguan mengenai kemampuan Jerman untuk menjadi negara yang demokratis. Namun, keraguan tentang stabilitas demokrasi dan konsolidasi Jerman pada masyarakat sipil terbantahkan. Meskipun demokratisasi negara dan masyarakat adalah proses yang terobosannya baru tercapai pada akhir tahun 1960. Keberhasilan redemokratisasi setelah 1945 dan keajaiban ekonomi *Wirtschaftswunder* yang terjadi di Jerman Barat dan Austria menjadi model bagi negara-negara industri di Barat (Henderson, 2021). Status Jerman ini disebabkan oleh kombinasi unik dari keberhasilan ekonomi, stabilitas politik, dan keseimbangan sosial. Pada pemilihan nasional tahun 1976, Partai Sosial Demokrat Jerman Barat mempromosikan "*German Model*". Namun, setelah reunifikasi Jerman Barat dan Timur, banyak tanda-tanda bahwa Jerman tidak layak lagi menjadi panutan. Alasannya, Republik Federal Jerman tertinggal dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Model tersebut teridentifikasi sebagai kebijakan usang yang menyebabkan stagnansi ekonomi Jerman pasca reunifikasi. Hal ini berkaitan dengan sistem manajemen yang menghambat adaptasi terhadap kondisi ekonomi terhadap globalisasi dan struktur tertentu dari negara kesejahteraan, yang di beberapa bidang terbukti menghambat penciptaan lapangan kerja.

Stabilitas demokrasi juga terbentuk melalui pembentukan konstitusi Jerman. Pasca Perang Dunia Kedua dan kegagalan Republik Weimar, Jerman membuat 20 pasal pertama dalam konstitusinya mencakup hak-hak non-negara, berupa hak atas kebebasan politik dan hak asasi manusia, yang sifatnya tidak dapat diubah oleh kongres (Lewan, 1968). Peraturan tersebut berguna untuk mencegah campur tangan negara terhadap hak atas partisipasi demokratis. Hak-hak sosial seperti pekerjaan, perumahan, pendidikan atau upah minimum tidak terkandung dalam konstitusi Jerman. Meskipun demikian, hak-hak ini diabadikan dalam konstitusi beberapa negara bagian. Konstitusi Jerman tidak memberlakukan sistem ekonomi tertentu. Namun, konstitusi Jerman menentang kapitalisme pasar yang tidak diatur dan menentang ekonomi sosialis yang sangat sentral dan terencana. Misalnya, Pasal 14 Konstitusi Republik Federal Jerman mengatur tentang jaminan hak milik dan warisan, tetapi juga mensyaratkan bahwa penggunaan hak milik ini harus untuk kepentingan bersama. Sistem politik Republik Federal Jerman dibangun dengan mengesampingkan kemungkinan gagalnya demokrasi. Dengan cara membatasi kekuasaan eksekutif untuk bertindak. Misalnya, federalisme dan partisipasi negara bagian dalam pembentukan UU Federal melalui *Bundesrat* (Dewan Federal), *Bundestag* (Parlemen), dan independensi posisi pengadilan Mahkamah Konstitusi dan Bank Sentral Federal. Karena banyaknya pembatas yang mengikat kekuatan Jerman sebagai negara, RFJ dapat diklasifikasikan sebagai negara semi-berdaulat (Karlstein, 1987). Perlu dicatat bahwa

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

hingga tahun 1990, dari sudut pandang kebijakan luar negeri, Republik Federal Jerman belum sepenuhnya berdaulat.

Demokrasi sosial sebagai instumen dan kelembagaan yang mengutamakan untuk berkompromi dengan berbagai kelompok kepentingan tidak merugikan Republik Federal Jerman itu sendiri. Sebaliknya, sistem pemerintahan justru menunjukkan efisiensi dan keterwakilan yang tinggi. Sistem parlementer terbukti cukup terbuka untuk menyerap perkembangan sosial, seperti pembentukan partai politik baru, serta memungkinkan pembentukan pemerintahan yang stabil. Dalam proses pembentukan hukum, input eksternal dari masyarakat disertakan secara teratur ketika masa dengar pendapat perwakilan kelompok kepentingan. Namun, peran utama dalam pembentukan aspirasi tetap terletak di tangan partai politik, seperti peranan partai politik sebagai mediator antara masyarakat dan negara. Selain ikut serta dalam pembentukan pemerintahan federal, partai politik juga ikut serta dalam pembentukan 16 negara bagian. Oleh karena itu, partai-partai tersebut tidak dapat dianggap sebagai partai pemerintah atau oposisi. Hal ini terutama terjadi pada dua partai massa besar seperti Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Kristen, baik CDU atau CSU, sehingga Republik Federal Jerman selalu dalam bayang-bayang koalisi besar, politik formal, dan informal. Khususnya dalam kebijakan ekonomi dan sosial, keterpaksaan untuk bekerja sama ini berujung pada pengejaran politik jalan tengah (Schmidt, 2007). Jerman mengalami periode demokrasi sosial yang sangat komprehensif hingga tahun 1970. Dalam hal penyesuaian akibat reunifikasi dan globalisasi, Jerman telah diklasifikasikan sebagai sosial demokrasi yang cukup inklusif. Demokrasi yang representatif ini dapat melahirkan kebijakan yang mengutamakan keterwakilan bagi kelompok yang memiliki kepentingannya masing-masing.

2.3 Ekonomi Campuran sebagai Struktur Ekonomi-Politik Jerman: *Collective Bargaining* dan *Public Owned Corporation*

Untuk memahami struktur nilai dan norma yang diterapkan pada kegiatan sosio-ekonomi di Jerman, perlu diketahui bahwa Jerman adalah negara menerapkan ekonomi pasar yang terkendali. Perusahaan negara memperoleh modal kerja dari bank konvensional, berlawanan dengan ekonomi pasar bebas yang memperoleh modal dari pasar modal. Ketergantungan antara industri dan perbankan adalah ciri utama dari apa yang dikenal sebagai ekonomi pasar sosial atau Kapitalisme Rhein (Hoffmann, 2004). Berdasarkan modal konvensional tersebut, keputusan bisnis menjadi memiliki orientasi jangka panjang dibandingkan dengan bisnis berdasarkan nilai pemegang saham yang lebih berorientasi jangka pendek. Hal yang menjadi ciri khusus dari perusahaan di Jerman adalah partisipasi karyawan

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

secara sistematis dalam manajemen perusahaan. Ini dapat terlihat melalui baik dalam hal partisipasi dalam unit bisnis "*Betriebliche Mitbestimmung"* yang berarti partisipasi dalam identifikasi dan manajemen tempat kerja, proses kerja, kerja individu, dan penyertaan pada perusahaan, maupun "*Unternehmen Mitbestimmung*" yang berarti partisipasi melalui perwakilan karyawan, yang duduk dalam direksi perusahaan. Partisipasi ini tampaknya tepat karena hubungan sosial pada dasarnya dibentuk oleh kerja sama semua mitra yang berpartisipasi.

Rekonstruksi pasca perang menjadi titik penting terbentuknya peraturan ketenagakerjaan. Pada tahun 1947, Konfederasi Serikat Buruh Jerman (Deutscher Gewerkschaftsbund/DGB) didirikan dan pada tahun 1950. Persatuan Asosiasi Pengusaha Jerman, yang didirikan oleh sekutu diakui sebagai organisasi pengusaha mandiri. Undang-Undang Perundingan Bersama (Tarifvertragsgesesetz/TVG) mulai berlaku pada bulan April 1949. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk perundingan bersama dan hanya mengalami sedikit perubahan dan modifikasi. Di Jerman timur, tidak ada undang-undang tersebut. Setelah penyatuan kembali Jerman pada tahun 1990, TVG berlaku di seluruh Republik Federal Jerman. Undang-Undang Ketenagakerjaan Jerman tahun 1952, digantikan pada tahun 1972, dan terakhir pada tahun 2001 menjadi dasar hukum untuk hubungan antara dewan pekerja dan pemberi kerja. Peraturan tersebut selalu menjadi sumber konflik politik yang sering terjadi antara pekerja dan pemberi kerja (Katz, 1993). Ada dua jenis perjanjian bersama di Jerman. Yaitu, kesepakatan antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha (Tarifverträge) dan kesepakatan antara pengusaha dan dewan pekerja (Betriebsvereinbarungen).

Undang-undang Dasar Jerman (Grundgesetz) menjamin hak semua individu untuk membentuk serikat-serikat pekerja serta asosiasi pengusaha di bidang perburuhan dan segala kondisi ekonomi (Sachs, 2011). Prinsip kebebasan berserikat yang positif meliputi hak untuk berserikat, bergabung dengan suatu serikat, menjadi anggota suatu serikat, tetap bergabung dalam serikat tersebut, dan keluar dari serikat tersebut. Hak atas kebebasan berserikat yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi Federal pada tahun 1979 berarti bahwa individu juga memiliki hak untuk tidak berserikat. Undang-undang, peraturan, atau kesepakatan apa pun yang melanggar kedua prinsip ini tidak berlaku. Dengan demikian, tidak ada pemberi kerja yang berhak meminta pekerja menjadi anggota serikat atau tidak, dan tidak ada asosiasi yang berhak meminta pemberi kerja hanya dipekerjakan sebagai anggota serikat atau tidak bergabung dengan serikat.

Oleh karena itu, semua pekerja dapat mengikuti perundingan bersama. Perundingan bersama diputuskan secara bebas oleh organisasi. Namun, ada kewajiban untuk menjaga

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

perdamaian bagi pekerja dan perusahaan mengenai hal-hal yang tercakup dalam kesepakatan bersama. Jika ada hal-hal yang tidak tercakup dalam kesepakatan bersama, asosiasi pekerja dapat menyatakan kebutuhannya dan meminta negosiasi. Jika pemberi kerja atau asosiasi pemberi kerja menolak untuk bernegosiasi, mungkin akan ada pemogokan untuk memaksa mereka kembali ke meja perundingan. Topik negosiasi dalam perundingan bersama biasanya adalah upah yaitu tunjangan, tunjangan, bonus, tarif produk, liburan, cuti sakit, pelatihan kejuruan, kontrak kerja (Hübler dan Jirjahn, 2003). Setiap aspek hubungan kerja dapat tunduk pada kesepakatan bersama. Cakupan dapat bersifat nasional, regional dan lokal. Perundingan bersama ini penting untuk dilihat bagaimana negara memfasilitasi masyarakat khususnya kelas pekerja untuk dapat melakukan negosiasi terhadap pemberi kerja atau perusahaan baik secara kolektif dengan berserikat maupun sebagai individu.

Peraturan lain yang menjadi manifestasi ekonomi campuran di pemerintahan Jerman adalah peraturan mengenai kepemilikan publik. Jerman memiliki kebijakan yang disebut *Public ownership* yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Konstitusi Jerman yang menyatakan, "Hak milik secara pribadi dilindungi oleh hukum. Namun, penggunaan hak milik tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau hak-hak orang lain." (Sachs, 2011). Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah Jerman untuk mengambil alih kepemilikan aset swasta jika diperlukan untuk kepentingan umum. Landasan hukum lain untuk public ownership di Jerman adalah Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Negara. Undang-undang ini mengatur pengelolaan aset negara, termasuk aset yang dimiliki oleh pemerintah federal dan negara bagian. Undang-Undang ini menetapkan bahwa aset negara harus digunakan untuk kepentingan umum dan harus dikelola secara efisien dan transparan. *Public ownership* di Jerman dapat digunakan untuk menjaga persaingan di pasar, terutama di sektor-sektor yang penting bagi perekonomian dan dapat digunakan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata.

2.4 Peraturan 50%+1 Sebagai Hasil Iklim Politik-ekonomi Jerman yang Inklusif

Sepak bola Jerman mengalami krisis pada tahun 2002 ketika Kirch Media, pemilik hak siar televisi saat itu, bangkrut. Namun, struktur kepemilikan dan gaya manajemen klub Jerman berbeda dengan bentuk klasik sebuah perusahaan (Drut dan Raballand, 2012). Perubahan yang diperkenalkan oleh *Deutsche Fußball Liga* (DFL), termasuk penetapan aturan yang disebut "50%+1". Asosiasi pendukung harus memiliki 50% plus satu suara dari setiap konsorsium klub sepak bola. Model pengelolaan oleh penggemar ini didasarkan pada keyakinan bahwa pendukung akan memastikan bahwa klub beroperasi untuk kepentingan komunitas dan kepentingan jangka panjangnya, bukan kepentingan pribadi pemiliknya. Model tata kelola ini

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

memastikan partisipasi penggemar sepak bola dan menghindari konflik kepentingan yang serius antara investor dan anggota penggemar (Acero et. al, 2017). Hukum perdata Jerman memberlakukan serangkaian persyaratan pada asosiasi anggota ini yang telah diterapkan pada klub, seperti persyaratan rapat umum dan dewan direksi. Namun, banyak klub telah melampaui persyaratan minimum dan memperkenalkan mekanisme tata kelola sukarela seperti dewan pengawas, komite audit, komite disipliner. Tujuan dari mekanisme sukarela ini adalah untuk memperbaiki struktur manajemen klub dan status profesional mereka.

Nilai dan norma di Jerman mengenai *collective bargaining* atau *public ownership* membentuk mekanisme peraturan yang lebih inklusif kepada klub-klub sepak bola di Jerman. Kedua peraturan tersebut memiliki landasan hukum dalam Undang-undang Dasar Jerman; yang kemudian ditransformasikan lagi menjadi peraturan yang lebih spesifik mengenai sepak bola dengan peraturan 50%+1 tersebut. Peraturan mengenai kepemilikan saham klub tersebut selaras dengan prinsip kebebasan, keadilan, dan kesetaraan yang terkandung dalam demokrasi. Pemerintah Jerman hanya menyediakan hukum perdata sebagai peraturan terhadap struktur perusahaan secara umum dan diteruskan oleh Asosiasi Sepak Bola Jerman yang menerbitkan peraturan progresif mengenai struktur kepemilikan sebuah klub atau perusahaan sepak bola; di sisi lain asosiasi sepak bola nasional tidak dapat menerima intervensi dari pemerintah. Hal tersebut menjadi contoh bagaimana hegemoni nilai dan norma secara tidak langsung turut mempengaruhi kebijakan yang dibuat, karena pemerintah Jerman juga tidak secara langsung mengatur mengenai struktur kepemilikan klub bola tersebut. Irisan masing-masing aspek dalam kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. Internalisasi nilai dan norma pada pemerintah Jerman membuat St. Pauli FC memiliki pondasi hukum yang kuat untuk dapat menjadikannya sebagai wadah representasi bagi pendukungnya. Iklim demokrasi sosial pemerintah Jerman yang inklusif menjadi prekondisi terhadap eksistensi St. Pauli FC.

	Collective Bargaining	Public Ownership	Peraturan 50%+1
Tujuan	Untuk meningkatkan upah, kondisi kerja, dan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.	Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kepentingan umum.	Untuk menjaga struktur kepemilikan klub sepak bola Jerman, memastikan keterwakilan penggemar, dan melindungi klub dari ketidakstabilan keuangan yang disebabkan oleh investasi eksternal yang berlebihan.
Aktor	Serikat pekerja dan	Instansi pemerintah, badan	Klub sepak bola, anggotanya, dan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

	asosiasi pengusaha.	usaha milik negara, dan lembaga sektor publik.	Liga Sepak Bola Jerman (DFL).
Cakupan	Bisa di seluruh industri, seluruh perusahaan, atau bahkan di tingkat tempat kerja individu.	Biasanya mencakup industri yang dianggap penting atau strategis, seperti utilitas, transportasi, dan layanan kesehatan.	Berlaku untuk semua klub sepak bola profesional di Jerman yang berpartisipasi di Bundesliga dan 2. Bundesliga.
Hasil	Perjanjian *collective bargaining* (Tarifverträge) yang menetapkan syarat-syarat yang mengikat bagi pekerja dan pengusaha.	Kepemilikan publik bisa bermacam-macam bentuknya, seperti kepemilikan pemerintah langsung, perusahaan publik, atau kepemilikan campuran.	Mencegah investor swasta mendapatkan kendali penuh atas klub sepak bola Jerman, mempertahankan pengaruh penggemar dalam tata kelola klub, dan mendorong stabilitas keuangan jangka panjang.
Keuntungan	Dapat menghasilkan upah yang lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, dan partisipasi pekerja yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.	Dapat mendorong akuntabilitas publik, memberikan layanan penting, dan memastikan persaingan yang sehat.	Melestarikan identitas unik dan budaya penggemar klub sepak bola Jerman, melindungi dari keputusan keuangan yang sembrono, dan mendorong pendekatan kepemilikan klub yang lebih berkelanjutan dan berorientasi komunitas.
Kerugian	Dapat menyebabkan pemogokan dan perselisihan industrial jika negosiasi gagal.	Dapat terkena campur tangan politik dan mungkin kurang fleksibel dalam kepemilikan pribadi.	Dapat membatasi kemampuan klub untuk menarik investasi skala besar untuk pembangunan infrastruktur atau transfer pemain, dan dapat menghambat daya saing mereka di bursa transfer internasional.
Peran di Jerman	Perundingan bersama merupakan landasan sistem hubungan industrial di Jerman dan memainkan peranan penting dalam menentukan upah dan kondisi kerja.	Kepemilikan publik memainkan peran penting dalam perekonomian Jerman, khususnya di sektor-sektor seperti utilitas, transportasi, dan perbankan.	Aturan 50%+1 adalah ciri khas tata kelola sepak bola Jerman dan berperan penting dalam membentuk karakter unik liga dan klub-klubnya.

Tabel 2.1 Perbandingan *Collective Bargaining, Public Ownership,* dan Peraturan 50%+1 Saham Sebagai Sebuah Kebijakan.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB III

St. Pauli FC Sebagai Sarana Representasi Budaya Masyarakat Distrik St. Pauli

3.1 Masyarakat Hamburg: Dua Kelompok Sosial Berbeda di Kondisi Geografis yang Berdekatan

Pada pertengahan abad kesembilan belas kota Hamburg mengalami perubahan dan perluasan. Beberapa peristiwa menjadi penyebab yang cukup krusial terhadap perkembangan kawasan ini. Kebakaran besar pada 5 Mei 1842 yang menghancurkan kurang lebih 1700 bangunan dan merenggut 51 jiwa dan pertumbuhan industrialisasi yang cukup masif di area sekitar pelabuhan. Kedua perkembangan tersebut memicu eksodus massal ke distrik St. Pauli. Diperkirakan akibat bencana dan perkembangan industrialisasi yang terjadi, sekitar dua puluh ribu orang pindah ke St. Pauli untuk mencari upah yang layak. Eksodus ini menyebabkan kepadatan penduduk dan kurangnya sanitasi. Pertumbuhan demografi ini mengubah struktur sosial yang ada di St. Pauli, memunculkan kawasan pelacuran, pembukaan teater, ruang dansa hingga musik (Striedieck, 2012). Sebagian besar pendatang menetap di kawasan pelabuhan dan Reeperbahn yang dapat dikatakan sebagai pusat kehidupan malam di kota tersebut. Sebagai hasil dari pertumbuhan industri, muncul komunitas pekerja di kawasan tersebut yang berisikan pekerja-pekerja di kawasan pelabuhan, yang menjadikan St. Pauli berbasis sayap kiri. Pembukaan galangan kapal seperti HC Stülcken pada tahun 1840, Blohm dan Voss pada tahun 1877 dan Norderwerft pada tahun 1906. Berkat meningkatnya pelayaran lintas samudera membuat kawasan itu disibukan oleh pekerja-pekerja pelabuhan yang memberikan nuansa proletar pada kawasan tersebut waktu itu.

Ekspansi angkatan kerja yang besar menyebabkan segregasi demografi di kawasan tersebut. Para pedagang kaya mulai meninggalkan daerah tersebut dan mulai pindah menjauhi kawasan pelabuhan dan mulai membangun hunian baru yang lebih besar di pinggiran kota. Rumah-rumah pedagang tersebut yang menjadi penampungan awal bagi sebagian angkatan pekerja yang mulai pindah ke distrik St. Pauli. Perluasan pelabuhan, pembangunan rel kereta barang, dan pembangunan kanal antara tahun 1884 dan 1888 mengorbankan sekitar dua puluh ribu rumah yang telah ada sebelumnya untuk dibongkar. Menyebabkan perpadatan penduduk karena kurangnya minat pemerintah untuk merelokasi keluarga . Akibatnya para penduduk yang terkena dampak perluasan membangun rumah-rumah kayu secara sembarangan hingga membentuk labirin, rumah tersebut sementara digunakan untuk tempat tinggal para pekerja yang bekerja di sekitar kawasan pelabuhan. Puncaknya adalah ketika para pekerja melakukan

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

protes pada bulan Mei 1890 dan bulan November 1896 antara kelas pekerja dan petugas keamanan. Alasan utamanya adalah kondisi kerja yang tidak layak dan upah yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Selain melakukan penyerangan terhadap polisi, pekerja yang melakukan demonstrasi juga menyabotase beberapa kapal yang berada di pelabuhan, beberapa mereka hanyutkan dan tenggelamkan (Evans, 1979). Mereka juga mengepung kantor ketenagakerjaan dan menyerang pekerja lain yang dilindungi oleh polisi. Penggunaan kekerasan tersebut dikecam oleh SPD dan menganggap mereka sebagai *lumpenproletariat* atau orang yang cenderung melakukan kekerasan, pemberontakan, prostitusi, dan pengangguran.

Sementara di satu sisi, pelabuhan yang telah dimodernisasi tersebut membuat kota Hamburg menjadi pusat perdagangan yang cukup sentral di Eropa, di sisi lain pemerintah yang berwenang tidak menunjukan minat untuk memperbaiki kelas sosial masyarakat distrik St. Pauli. Bahkan justru menganggap distrik-distrik proletar sebagai tempat munculnya bahaya moral dan kekacauan sosial. Hal ini meningkatkan kontras antara kondisi sosial kelas borjuis dan kelas pekerja di Hamburg pada periode kesenjangan sosial akhir abad kesembilan belas. Kedua kelompok sosial ini hidup berdekatan secara geografis, namun kondisi kehidupan mereka semakin berbeda.

3.2 Eksistensi St. Pauli FC Hingga Berakhirnya Perang Dunia Kedua

Daerah atau tempat klub berdiri penting pada proses berkembangnya suatu klub. Setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing dan klub sepak bola bukanlah entitas statis; mereka tumbuh, tidak terkecuali dengan St. Pauli. Dari menjadi olahraga untuk kelas pekerja hingga menyediakan sepak bola untuk orang kaya, dari kegiatan pilihan hingga kegiatan masyarakat. Hamburg-St. Pauli Turnverein pada awalnya adalah lembaga khusus laki-laki yang didirikan oleh Franz Reese pada tahun 1862 ketika senam sedang berkembang pesat di sisi kanan sungai kota Elbe yang merupakan daerah yang terdiri dari daerah kaya *Karolinenviertel* dan *Schanzenviertel*. Pada saat itu Hamburg St. Pauli memiliki dua wilayah yang dibedakan antara utara sebagai borjuis dan dengan karakter nasionalistik dan selatan yang dekat dengan pelabuhan dan dihuni oleh pekerja (Jørgensen dan Makrygianni, 2020). Ekspansi angkatan kerja yang sangat besar telah menyebabkan semacam segregasi populasi.

Klub St. Pauli sendiri baru memainkan pertandingan pertamanya pada tahun 1907 meskipun referensi mengenai permainan sepak bola di daerah tersebut sudah dimulai pada tahun 1899 ketika Jerman mulai memperkenalkan sepak bola di negara itu. Klub St. Pauli baru didirikan secara resmi pada tahun 1910. Baru pada tahun 1924 klub ini mengadopsi nama St.

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pauli FC dari yang sebelumnya St. Pauli Turnverein karena adanya peraturan yang memaksa klub sepak bola untuk dapat memisahkan diri dari asosiasi senam. Kegiatan klub ini pada paruh pertama pada abad 20 banyak dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan seperti senam dan atletik.

St. Pauli FC pada masa kepemimpinan Nazi tidak dapat melanjutkan kegiatan keolahragaannya karena pemerintahan Nazi memenjarakan banyak kaum komunis dan sosial demokrat pada masa itu. Selain itu, totalitarianisme Nazi turut berarti meluasnya kontrol negara terhadap segala aspek, tak terkecuali aspek sosial (Hesse-Lichtenberger, 2003). Rezim Hitler mencoba menjadikan sepak bola sebagai sarana propaganda oleh rezim itu; hal ini menjadi paradoks ketika Hitler sebagai pribadi tidak menyukai bidang olahraga. Dia tercatat hanya menghadiri satu kali pertandingan sepak bola dalam hidupnya yaitu ketika Jerman kalah melawan Norwegia pada Olimpiade Berlin di 1936.

Ketika perang berakhir, kondisi sosial dan ekonomi di kota Hamburg perlahan pulih. Pendudukan sekutu, militerisasi, dan pecahnya Jerman menjadi dua negara mengharuskan mereka untuk membentuk kembali sistem pemerintahan pasca perang. Dalam pemilihan regional pertama setelah perang di Hamburg, partai SPD menang dan mengambil kendali pemerintahan kota tersebut (Viñas et. al, 2020). Perekonomian di kota tersebut cepat pulih seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa lainnya. Masa keajaiban ekonomi atau "*economic miracle"* pada tahun 1950-an hingga 1960-an membuat Jerman sementara menjadi pusat ekonomi di Eropa. Masa-masa kebangkitan ekonomi Jerman ini turut membuat dampak positif di distrik St. Pauli. Galangan-galangan di pelabuhan kawasan tersebut mulai beroperasi kembali pada kinerja puncaknya. Hingga pada tahun 1961 telah rampung stadion baru St. Pauli dengan kapasitas awal 32.000 hingga kemudian menjadi 20.269 karena buruknya sistem drainase membuat lahan yang awalnya akan digunakan untuk penonton digunakan untuk menutupi hal tersebut. Pertandingan perdana stadion tersebut adalah ketika tim tuan rumah bertemu dengan CDNA Sofia Bulgaria (CSKA Sofia) dengan kemenangan St. Pauli 7 berbanding 4.

Pada tahun 1967 terjadi kontroversi di tubuh St. Pauli FC itu sendiri ketika presiden klub Wilhelm Koch secara terbuka menuduh mantan pemain yang menjadi manager St. Pauli waktu itu tidak cukup memotivasi para pemain. Justru Krause tertangkap mata oleh presiden klub ketika sedang berkunjung ke sebuah klub penari telanjang di distrik tersebut. Presiden klub menilai Krause memiliki hubungan yang dekat dengan lingkungan dan beberapa gangster di distrik itu. Pada tahun yang sama terjadi pembunuhan oleh polisi terhadap Benno Ohnesorg ketika demonstrasi menentang datangnya Reza Pahlavi diktator Iran yang dibelakangi oleh Amerika Serikat. Kemudian terbentuklah *Außerparlamentarische Opposition* (APO) yang terdiri dari kumpulan organisasi dan partai yang heterogen tanpa perwakilan institusional;

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

menentang kebijakan *Große Koalition* yang terdiri dari partai sayap kanan CDU dan SPD. Kegagalan untuk menentang *Emergency Law* yang memberikan pemerintah kontrol yang lebih besar membuat koalisi APO pecah. Terjadi radikalisasi di level akar rumput yang menyebabkan kekacauan tak terkecuali di distrik St. Pauli (Viñas et. al, 2020). Pengangguran juga meningkat akibat beberapa galangan kapal dan tempat rekreasi yang ditutup bersamaan dengan meningkatnya kejahatan yang terorganisir dan meningkatnya persebaran penyakit seksual di distrik tersebut. Masa keemasan ekonomi ini ditutup dengan memburuknya reputasi distrik St. Pauli di Jerman Barat.

3.3 Subkultur di St. Pauli dan Upaya Representasi Masyarakat Melalui Sepak Bola

Kebangkitan pasca perang juga berarti restrukturisasi pemukiman-pemukiman kota di Jerman. Tak terkecuali Hamburg, terkhususnya distrik St. Pauli yang sangat erat kaitannya dengan kawasan pelabuhan. Perekonomian yang membaik memberikan dampak positif bagi kelas pekerja pelabuhan di distrik itu. Surplus ekonomi yang mereka terima terkadang membuat para kelas pekerja ini membutuhkan sarana hiburan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Hingga akhirnya turut terbentuk kawasan kehidupan malam di distrik St. Pauli yang disebut *Reeperbahn* (Cartledge, 2018). Kawasan ini sebenarnya adalah jalan raya sepanjang 930 m yang sangat terkenal akan hiburan malamnya dan hanya berjarak kurang lebih 1,5 km dari galangan kapal tua di sungai Elbe distrik St. Pauli. Letak strategis yang ada menjadikan daerah ini sebagai pusat budaya dan sosial di mana berbagai kelompok masyarakat bertemu. Pelaut dan pekerja pelabuhan, pekerja kreatif, pelacur, dan gangster hidup bersama secara bebas. Distrik ini merupakan ruang kreasi dan toleransi, di mana hal-hal yang biasanya dilarang, lumrah dilakukan.

Oleh karena itu, kemunculan budaya-budaya baru merupakan hal yang tidak terhindarkan. Lingkungan ini lambat laun menjadi episentrum munculnya dunia musik anak muda. Pada awal tahun 1950 hingga 1960-an turut melahirkan generasi muda yang berorientasi hanya pada kesenangan yang cukup populer di kondisi sosial pasca perang di Inggris; berbeda dengan generasi ketika peperangan berlangsung. Hal ini turut memengaruhi terbentuknya kultur di distrik tersebut ketika kebangkitan musik *rock and roll* sampai di daerah tersebut. Hamburg menjadi kota dengan pendudukan Inggris pasca perang; ini juga menjadi jawaban mengapa beberapa kultur-kultur yang telah berkembang di Inggris terlebih dahulu terbawa dan turut mempengaruhi kultur lokal di distrik St. Pauli. Formasi asli The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe dan Pete Best secara rutin tampil di berbagai klub di Hamburg, Jerman Barat, selama periode Agustus 1960 hingga Desember 1962 (Owen, 2019).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Di Hamburg kala itu, terbentuk dua budaya yang berlawanan di sekitar musik; yang juga menjadi katalis bagi budaya anak muda pada tahun tersebut yaitu "rockers" dan "exist". Evolusi distrik St. Pauli pasca perang menjadi penting untuk dapat memahami perkembangan St. Pauli FC hingga saat ini.

St. Pauli FC sebagai klub bola tradisional memiliki beberapa pencapaian pada tahun 1970-an. Klub sepak bola ini promosi dari liga regional ke Bundesliga 2 pada musim 1974 dan beberapa tahun kemudian promosi ke kasta tertinggi liga Jerman yaitu Bundesliga pada musim 1977. Sejak awal pembentukan hingga pada tahun tersebut, klub ini dapat dikatakan sebagai klub bola tradisional pada umumnya. Pada rentang tahun yang sama terjadi kericuhan akibat penentangan terhadap pemerintahan yang berkuasa; menghasilkan kelompok-kelompok otonom di distrik St. Pauli (Petroni dan Viccaro, 2015). Ketimpangan yang terjadi di kota Hamburg turut mempengaruhi aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok otonom tadi. Pada 19 April 1973 terjadi pendudukan terhadap bangunan di Jalan Ekhofstraße nomor 39. Pendudukan tersebut dilakukan sebagai respons atas pembangunan 450 bangunan flat mewah di Hohenfelde sebuah kawasan di utara Hamburg. Penghuni liar tadi mengincar bangunan-bangunan yang telah ditinggalkan untuk ditempati. Pemerintah waktu itu menganggap hal ini sebagai masalah dan kemudian mengirimkan lebih dari 600 polisi ke kawasan pendudukan penghuni liar tersebut. Pemerintah mengkriminalisasi mereka dengan tuduhan terorisme dan kejahatan yang terorganisir, sehingga respons polisi terhadap mereka menjadi lebih brutal. Tujuh puluh orang penghuni liar ditangkap dan 33 di antaranya dituduh terafiliasi dengan kelompok kriminal. Pengusiran oleh kepolisian pada masa itu berhasil dilakukan, tetapi peristiwa tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi kelompok penghuni liar pada tahun-tahun berikutnya. Linimasa mengenai perkembangan masyarakat distrik St. Pauli, St. Pauli FC sebagai klub, dan hubungan internasional yang terjadi dijelaskan dalam Tabel 3.1 dengan periode sebelum Perang Dunia Pertama, sebelum dan setelah Perang Dunia Kedua, dan periode setelah reunifikasi Jerman.

Masyarakat St. Pauli	St. Pauli FC	Hubungan Internasional
1863: Organisasi buruh pertama di St. Pauli, Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein (Asosiasi Pekerja Umum Jerman). 1869: Partai Sosial Demokrat (SPD) didirikan. 1892: SPD memenangkan mayoritas kursi di dewan kota Hamburg.	1907: Terbentuk FC St. Pauli Turnverein. 1910: Klub ini berdiri secara resmi.	1898: Jerman ikut serta dalam perlombaan ekspansi kolonial, memperoleh wilayah di Afrika dan Oseania. 1914: Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand memicu pecahnya Perang Dunia I.
1919: SPD adalah partai terbesar di	1924: Berganti nama	1918: Jerman kalah dalam Perang

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Republik Weimar yang baru, dan St. Pauli adalah basis kuat partai tersebut. 1933: Nazi merebut kekuasaan di Jerman dan menekan gerakan buruh. Banyak pemimpin buruh ditangkap dan dipenjarakan, dan lainnya terpaksa meninggalkan negara tersebut. 1944: Distrik St. Pauli dibom secara besar-besaran selama Perang Dunia II, dan sebagian besar perumahan kelas pekerja hancur.	menjadi FC St. Pauli 1910. 1931: Promosi ke papan atas sepak bola Jerman untuk pertama kalinya. 1933: Terdegradasi ke divisi dua karena kebangkitan Partai Nazi. 1945: Stadion Millerntor Stadion, hancur dalam Perang Dunia II.	Dunia I dan mengalami kerugian teritorial dan pembayaran reparasi. Pada tahun 1918, Revolusi November menggulingkan monarki Jerman dan mendirikan republik. 1919: Perjanjian Versailles secara resmi mengakhiri Perang Dunia I dan membentuk Liga Bangsa-Bangsa. 1933: Adolf Hitler dan Partai Nazi berkuasa di Jerman, membentuk rezim totaliter. 1939: Jerman menginvasi Polandia, memicu pecahnya Perang Dunia II.
1946: Gerakan buruh di St. Pauli perlahan dibangun kembali setelah perang. 1949: SPD mendapatkan kembali popularitasnya di distrik tersebut, dan terus menjadi kekuatan utama dalam politik lokal. 1960-70an: St. Pauli menjadi pusat gerakan sayap kiri dan anti kemapanan yang dipengaruhi oleh budaya musik rock karena mereka merupakan kawasan yang diduduki oleh Inggris. 1982: Pendudukan terhadap beberapa bangunan dekat stadion Millerntor 1980an: Menjadikan St. Pauli FC sebagai ruang representasi masyarakat distrik tersebut.	1946: Stadion Millerntor yang dibangun kembali dibuka. 1963: Pendirian Bundesliga, liga sepak bola profesional terkemuka di Jerman. St. Pauli tidak termasuk dalam musim perdana. 1964: St. Pauli dipromosikan ke Bundesliga untuk kedua kalinya. 1981: St. Pauli mencapai final DFB-Pokal, tetapi kalah dari Hamburger SV. 1987: St. Pauli terdegradasi ke divisi tiga untuk pertama kalinya.	1945: Jerman dikalahkan dalam Perang Dunia II dan dibagi menjadi empat zona pendudukan. 1949: Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) didirikan. 1955: Jerman Barat bergabung dengan NATO, sedangkan Jerman Timur bergabung dengan Pakta Warsawa. 1961: Tembok Berlin didirikan, memisahkan Berlin Timur dan Barat.
1990an: Gerakan sayap kiri di St. Pauli mengalami kebangkitan. Toko buku Rote Flora dan Hafenstraße 20 telah ditempati kembali dan istrik St. Pauli menjadi pusat antifasisme dan antirasisme. Kontemporer: Gerakan sayap kiri di St. Pauli tetap aktif. Sering terjadi protes terhadap gentrifikasi, kenaikan harga sewa, dan privatisasi layanan publik. Distrik St. Pauli masih menjadi rumah bagi sejumlah organisasi sayap kiri, dan distrik ini menjadi pusat aktivisme dan protes.	1998: Peraturan kepemilikan 50%+1 dibuat DfB 2000: Klub ini diambil alih oleh fans, dan mulai mengambil sikap anti-fasis dan anti kemapanan. Hal ini membuat St. Pauli populer di kalangan penggemar sayap kiri dan liberal, dan popularitas klub semakin meningkat. 2018: St. Pauli FC memenangkan 2. Bundesliga dan dipromosikan ke Bundesliga untuk kelima kalinya. 2020: St. Pauli terdegradasi	1990: Reunifikasi Jerman terjadi, menyatukan kembali bekas Jerman Timur dan Barat. 1992: Uni Eropa didirikan melalui penandatanganan perjanjian Maastricht 1999: Jerman mengadopsi euro sebagai mata uangnya. 2015: Jerman mengalami krisis pengungsi karena sejumlah besar orang mengungsi dari zona konflik di Suriah, Irak, dan negara-negara lain.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

	kembali ke divisi dua.	

Tabel 3.1 Linimasa Antara Masyarakat St. Pauli, St. Pauli FC, dan Hubungan Internasional.

Pada tahun 1981, penghuni liar menduduki dua belas bangunan di Hafenstraße, sebuah jalan di St. Pauli. Pendudukan ini menjadi simbol perlawanan gerakan penghuni liar terhadap gentrifikasi dan perjuangannya untuk mendapatkan pilihan perumahan alternatif. Penghuni liar Hafenstraße mengorganisir diri mereka menjadi sebuah komunitas kolektif dan mengembangkan komunitas yang dikelola sendiri (Glindmeier dalam Kuhn, 2019). Mereka menetapkan aturan dan pedoman mereka sendiri untuk hidup bersama, menekankan rasa saling menghormati, solidaritas, dan non-diskriminasi. Pendudukan Hafenstraße berlangsung selama lebih dari satu dekade, dan menjadi titik fokus utama aktivisme politik dan perubahan sosial di Hamburg. Para penghuni liar menghadapi banyak upaya penggusuran dari pemerintah kota, namun mereka juga mendapat dukungan luas dari masyarakat lokal dan sekitarnya.

Pada hari pertama pertandingan musim 1986 s.d. 1987, sekelompok sekitar 60 punk dan otonom Hamburg pergi menonton pertandingan di stadion Millerntor untuk pertama kalinya. Kegiatan menonton St. Pauli FC dirasa ideal bagi mereka, karena jaraknya kurang dari satu kilometer dari Hafenstraße. Kehadiran mereka, lebih jauh lagi, kebetulan bertepatan dengan keinginan pelatih tim Willi Reimann untuk mempromosikan 'sepak bola alternatif' yang dibangun dari komitmen, semangat, semangat juang, dan hati. Untuk mencapai hal ini, dia tidak bisa memiliki sekutu yang lebih baik daripada para pendukung Hafenstraße, begitu mereka dikenal secara umum.

Mulanya, kehadiran para pemuda pendukung Sankt Paulianer terlihat antifasis dan memiliki relasi dengan gerakan penghuni liar. Pada tahun 1990-an, penghuni liar Hafenstraße akhirnya mencapai kesepakatan dengan pemerintah kota untuk melegalkan pendudukan mereka. Bangunan-bangunan tersebut dibeli oleh koperasi yang dikelola sendiri, dan para penghuni liar dapat terus tinggal dan bekerja di ruang tersebut. Meskipun pendudukan Hafenstraße merupakan kemenangan signifikan bagi gerakan penghuni liar, hal ini tidak mengakhiri perjuangan untuk mendapatkan perumahan alternatif dan ruang komunitas di St. Pauli. Gentrifikasi dan kenaikan biaya perumahan terus menimbulkan tantangan bagi banyak penduduk, dan gerakan penghuni liar tetap aktif dalam mengadvokasi perumahan yang terjangkau dan keadilan sosial.

Pada tanggal 7 September 1991, diadakan Festival Viva St. Pauli. Ini adalah acara kontra-budaya yang diselenggarakan oleh gerakan otonom dan penghuni liar Hafenstraße (Totten, 2018). Tujuannya adalah mengumpulkan dana untuk membayar hutang yang timbul dari pembayaran bantuan hukum oleh para aktivis gerakan ini. Tujuan penyelenggara adalah

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

agar festival tersebut diadakan di stadion St. Pauli, sebuah ide yang awalnya ditolak oleh direktur klub; karena takut akan tindakan vandalisme selama konser. Namun demikian, setelah penggagas mengasuransikan acara tersebut; klub memberi mereka ruang untuk acara tersebut diadakan di Millerntor. Festival ini juga menjadi titik balik bagi klub dapat mengembangkan pengikut massal. Hal ini membantu mengakarkan klub di distriknya melalui keterlibatan penggemar dalam proyek sosial yang berbeda, seperti proyek yang memiliki keluarga migran generasi pertama dan kedua. Itulah sebabnya imigran merasa dapat diterima dalam mendukung klub ini.

3.4 Hegemoni Pasar Bebas di Sepak Bola Eropa

Neoliberalisasi sepak bola Jerman merupakan sebuah proses di mana liga sepak bola yang pada awalnya merupakan sebuah struktur egaliter menjadi lebih komersial. Liga Jerman atau Bundesliga dapat dikatakan sebagai liga yang kompetitif pada awalnya, sebelum modal atau kapital menjangkau beberapa klub saja di liga itu. Hal yang tidak dapat terhindarkan karena sepak bola Jerman maupun Eropa secara keseluruhan menjadi sorotan bagi masyarakat dunia. Pendapatan klub-klub sepak bola yang besar membuat investasi-investasi atau kepemilikan atas klub menjadi jalan bagi kelompok tertentu untuk dapat memperbesar lagi pendapatan atau perolehan kapital mereka (Irgali, 2022). Beberapa klub besar di Eropa bahkan tidak dimiliki oleh orang-orang Eropa itu sendiri, beberapa dimiliki oleh investor atau konglomerat besar yang berasal dari Amerika Serikat, Russia, atau negara-negara Arab.

Aturan-aturan atas kepemilikan klub sudah diatur oleh FIFA sebagai asosiasi induk sepak bola dunia. Tetapi, asosiasi di tingkat nasional dapat menyesuaikan prasyarat untuk seseorang atau suatu kelompok untuk dapat memiliki sebuah klub. Asosiasi sepak bola Jerman atau yang dikenal sebagai *Deutscher Fußball-Bund* (DFB) memiliki aturan yang cukup kuat untuk dapat menjadikan liga-liga di Jerman tetap kompetitif. DFB mensyaratkan kepemilikan atas klub sepak bola di Jerman untuk dimiliki oleh para fans atau pendukung dengan komposisi kepemilikan yang lebih besar, yaitu 50%+1 dari saham total klub. Hal tersebut tercantum dalam *Bundesliga Satzung* yang merupakan statuta kepengaturan liga di Jerman juga konstitusi sepak bola di Jerman; karena aturan-aturan sepak bola merupakan hal yang terpisah dengan aturan-aturan pemerintah nasional. Hal ini menandakan bagaimana dominasi FIFA terhadap relasi kuasa induks sepak bola tersebut terhadap negara.

Realitas sepak bola Jerman merupakan hal yang unik dan sangat kontras dengan sepak bola di Inggris dalam hal kepemilikan sebuah klub. Jerman memiliki konstitusi sepak bola yang memberikan pendukung klub porsi yang lebih besar untuk dapat menuntun arah gerak klub itu,

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

jika dibandingkan dengan kepemilikan klub sepak bola di Inggris yang lebih bebas dengan porsi penuntunan arah klub yang besar (Wagner et. al, 2022). Kepemilikan atas klub menjadi aspek penting dalam berjalannya suatu klub. Kepemilikan ini turut melihat apakah klub sepak bola hanya akan dijadikan alat mencari profit atau sebagai sebuah identitas atas pendukung klub. Klub sepak bola konvensional pada pasar bebas atau neoliberalisasi sepak bola ini kerap kali memiliki kekuasaan sentral pada satu orang atau satu investor besar. Nantinya akan terlihat bagaimana otoritas sentral tadi memiliki posisi paling tinggi dalam struktur sebuah klub dan bagaimana pengaruh individu-individu tersebut atas jalannya klub tersebut.

Klub merupakan asosiasi dari orang-orang yang mendukung atau menyelenggarakan klub, mereka terbagi atas kekuasaan yang berbeda-beda. Hal tersebut akan dianalisis menggunakan konsep hegemoni oleh Gramsci. Terdapat dua kelompok yang dapat diambil dalam kepemilikan sebuah klub, kelompok dominan yang terdiri dari jajaran manajerial klub dan kelompok subordinat yang menghidupi sebuah klub sebagai penggemar dan pendukung. Kelompok dominan memiliki kendali atas politik dan ekonomi sebuah klub tadi sedangkan kelompok subordinat tidak memiliki hal tersebut. Tetapi, kelompok subordinat atau penggemar tadi memiliki memiliki fungsi yang sentral dalam melanggengkan budaya sebuah klub; budaya ini penting karena nilai-nilai historis dapat menjadi hal yang dapat dijual oleh kelompok dominan ke masyarakat luas. Ideologi dan budaya yang dilestarikan oleh kelompok dominan merupakan cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Konsensus menjadi hasil dari kontrol atas ideologi dan budaya tersebut. Konsensus diraih dengan cara propaganda dan persuasi kepada kelompok subordinat atau kelompok penggemar. Konsensus tersebut berfungsi sebagai perluasan nilai dan norma kelompok dominan dengan maksud yang menguntungkan mereka; melalui proses yang tampak wajar dan alami, seperti persuasi dan propaganda.

Hegemoni pada sepak bola berkutat di pusaran neoliberalisme pasar bebas. Pewajaran atas tiket yang mahal, keharusan atas kepemilikan seragam klub dari musim ke musim, kontrol atas aspirasi yang boleh dibawa ke dalam stadion. Hegemoni di sini dapat berupa ideologi atau budaya yang seperti terlihat wajar dan lumrah; padahal sudah sangat tercabut dari asal sepak bola itu tercipta, yaitu kelas pekerja. Asosiasi Sepak Bola Inggris mengadopsi metode neoliberal '*governing without governing*' dengan melakukan promosi solusi pasar sebagai mode pemerintahan alternatif (Dubal, 2010). Contohnya, ketika tiket Manchester United mengalami kenaikan sebesar 700% dari tahun 1990-an di harga 3,5 pounds hingga 28 pounds. Terjadi protes oleh penggemar Bayern Munich ketika bertandang ke Liverpool pada 2022 karena mahalnya tiket laga UCL di Inggris. Pada saat itu, terjadi perbedaan yang cukup mencolok untuk harga tiket untuk laga kualifikasi grup UCL di Jerman hanya 15 s.d. 25 euro dan ketika

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

di Inggris mencapai 50 s.d. 70 pounds. Liverpool yang merupakan kota pelabuhan sama seperti St. Pauli FC yang diawali oleh kelas pekerja dalam pembentukan komunitas pendukung tetapi dapat berakhir berbeda.

Hegemoni neoliberalisme di sepak bola bekerja ketika kaum borjuis dalam hal ini pemilik klub dan pimpinan manajerial sepak bola menemukan kepentingan ekonomi mereka, mengubah sepak bola menjadi bisnis yang menguntungkan. Kelas menengah menjadi kelompok paling dibutuhkan pada fase neoliberalisasi sepak bola ini (Radoiu, 2019); mereka memiliki kemampuan untuk datang ke stadion dan fasilitas stadion diperbaiki untuk dapat menarik atensi mereka. Hegemoni bekerja ketika terjadinya pengecualian bagi mereka yang tidak mampu menjangkau tiket untuk dapat menonton; yang merupakan salah satu bagian dari kontrol masyarakat dengan paksaan tidak langsung yaitu harga tiket yang mahal. Kehadiran petugas keamanan swasta di stadion juga menjadi alat kontrol dari klub untuk menegakkan ideologi atau nilai yang mereka anut; ketika beberapa clash terjadi akibat kerusuhan pendukung dengan petugas keamanan. Hegemoni terbentuk akibat aktivitas rutin yang telah menjadi wajar, sebelum dan ketika bertanding, seperti mengenakan kaos tim resmi, membeli dari toko resmi, menghabiskan uang di stadion sebelum pertandingan, dan rela membayar mahal tiket ke stadion. Hegemoni ini telah mengikat banyak penggemar terhadap komersialisasi atau neoliberalisasi sepak bola itu sendiri; yang cukup sulit terelakkan dalam sepak bola modern ini.

3.5 Bagaimana Kontra Hegemoni Terjadi di St. Pauli FC

Berbeda dari klub-klub pada umumnya di pusaran sepak bola Eropa, St. Pauli FC menjadi klub yang unik atas kepengurusan klub tersebut. Benar bahwa peraturan sepak bola Jerman yang menerapkan 50%+1 saham penggemar diterapkan kepada seluruh klub yang berlaga di Bundesliga; pengecualian untuk perorangan atau kelompok yang telah mengelola klub lebih dari dua puluh tahun seperti halnya Bayer Leverkusen yang dimiliki oleh raksasa farmasi Bayer, Vfl Wolfsburg dimiliki oleh perusahaan mobil Volkswagen, dan 1899 Hoffenheim dimiliki oleh Dietmar Hopp. St. Pauli FC menjadi unik karena mereka adalah wadah dari representasi masyarakat lokal di distrik St. Pauli untuk dapat menyuarakan aspirasi mereka di dalam maupun luar lapangan. St. Pauli FC yang berkompetisi di Bundesliga 2 saat ini tidak lepas dari hegemoni neoliberalisasi sepak bola yang ada di Jerman.

Berbeda dengan klub-klub lain di Bundesliga, St. Pauli FC memiliki cara untuk dapat mengakali komersialisasi sepak bola di Jerman. Dengan kondisi yang sama pada peraturan 50%+1 kepemilikan klub, beberapa dengan sangat jelas terkait dengan komersialisasi seperti ketika pembelian nama-nama stadion dengan jangka waktu oleh beberapa perusahaan besar

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

seperti Allianz, Redbull, Signal Iduna, Mercedes-Benz, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Hegemoni itu sendiri memiliki celah terhadap terciptanya resistensi dari kelas subordinat yang memiliki nilai yang berbeda dengan arus utama (Gramsci, 1971). Disebut sebagai kontra-hegemoni oleh Gramsci yang percaya bahwa ideologi dominan dapat ditentang dan digantikan oleh alternatif yang lebih progresif. Gramsci (1971) berargumentasi bahwa kekuasaan bukan hanya tentang paksaan dan pemaksaan; ia juga beroperasi melalui kendali ide dan budaya. Hal ini melibatkan pengembangan ideologi tandingan yang menantang ideologi dominan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, propaganda, dan gerakan sosial. Tujuan dari kontra-hegemoni adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Gramsci (1971) berpendapat bahwa kontra-hegemoni adalah proses jangka panjang yang memerlukan pengembangan kepemimpinan intelektual dan moral yang kuat. Ia juga percaya bahwa penting untuk membangun aliansi dengan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sama.

	St. Pauli FC	Klub Sepak Bola Konvensional
Nilai-Nilai	Tercantum ke dalam konstitusi yang menjadi prinsip dasar seperti anti-diskriminasi, anti-kekerasan, solidaritas, rispek, dan fair play	Prestasi klub menjadi bagian penting dan pengupayaannya adalah dengan menjadikan klub
Struktur Kepemilikan	Para pendukung	Individu atau perusahaan
Pengambilan Keputusan	Melalui dewan direksi yang dipilih oleh para pendukung	Melalui pemilik klub
Keterlibatan dan Perwakilan Kepentingan Pendukung	Terlibat dalam pengambilan keputusan secara langsung	Tidak terlibat secara langsung
Sponsorship	Menerima sponsorship dari perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan klub	Menerima sponsorship dari perusahaan mana pun
Harga Tiket	Dijual dengan terjangkau sesuai dengan perundingan tahunan	Dijual dengan harga yang lebih tinggi
Komunitas Pendukung	Beragam latar belakang dan keyakinan	Biasanya terdiri dari orang-orang dari latar belakang yang sama
Identitas Pendukung di Stadion	Jersey bukan merupakan identitas tunggal di dalam stadion	Terkadang jersey menjadi penting sebagai identitas tunggal di dalam stadion
Pengaruh di luar Stadion	Tetap terikat dengan identitas klub	Terlepas dengan identitas klub

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel 3.2 Perbandingan Kepengurusan St. Pauli FC dengan Klub Sepak Bola Konvensional

Kontra-hegemoni pada St. Pauli FC terjadi melalui beberapa hal. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 yang membandingan budaya alternatif yang digunakan St. Pauli FC dibandingan budaya konvensional klub sepak bola lain di Eropa. Pertama adalah cara kepengurusan klub St. Pauli FC itu sendiri. Mereka tetap mengikuti struktur klub konvensional dengan presiden klub sebagai pimpinan yang dipilih oleh 25 dewan perwakilan yang telah dipilih terlebih dahulu oleh para anggota klub; anggota klub adalah mereka yang telah mendaftarkan diri secara resmi pada klub itu dan itu boleh siapa saja. St. Pauli FC memiliki prinsip dasar atau *leitlinien* yang berupa 12 Pasal Konstitusi Klub yang mencakup mengenai anti-diskriminasi, anti-kekerasan, solidaritas, respek, dan *fair play*. St. Pauli FC menjadi klub sepak bola pertama yang memiliki pasal konstitusi untuk menjalankan klub tersebut; sekaligus mengikat nilai dan ideologi klub terkait dengan komersialisasi sepak bola kontemporer; juga sebagai ideologi tandingan dari apa yang terjadi di klub sepak bola konvensional lainnya (Totten, 2015). Hal ini menjadi pertanggungjawaban semua anggota klub, pimpinan, dan dewan perwakilan untuk dapat mengikuti nilai itu. Pimpinan hanya berfungsi sebagai pengurus harian klub itu berjalan; tidak ada yang spesial dari posisi tersebut. Nilai dan norma yang terkandung dalam pasal tersebut jadi landasan untuk komunitas yang mendukung St. Pauli FC untuk dapat bertindak; yang sangat berbeda dengan penggemar klub kebanyakan. Nilai komersialisasi yang dominan yang akan terjadi terhadap klub ini akan minim.

Untuk membangun budaya di stadion yang inklusif, di samping dengan menjual kaus jersey secara resmi, mereka juga mempersilahkan para pendukung untuk mencetak sendiri atas apa yang akan mereka pakai di stadion ketika St. Pauli FC sedang berlaga. Meskipun hal tersebut boleh dilakukan, para pendukung St. Pauli FC sudah terkenal dengan budaya menggunakan kaus berwarna hitam bergambar tengkorak pelaut. Hal tersebut karena St. Pauli adalah kota pelabuhan dan gerakan otonom yang membajak perumahan di sekitar pelabuhan pada awal pengultusan klub. Selain itu, hal tersebut berarti sebagai sarana inklusivitas, sekaligus sebagai deklarasi, bahwa di stadion, mereka berada dalam posisi yang setara. Nilai dominan yang terjadi di sepak bola kontemporer adalah pengutamaan hak cipta yang menjadi hal utama dalam pasar bebas secara global; juga terkait dengan profit yang menjadi salah satu sumber pendapatan klub. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berlaku di St. Pauli FC.

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Nilai-nilai dalam budaya pemerintahan Jerman menjadi hal yang penting terhadap eksistensi St. Pauli FC kontemporer. Nilai dan norma tersebut secara historis telah menjadi bagian penting bagi pembentukan Jerman sebagai negara hingga kepengaturan terhadap masyarakatnya. Praktik kenegaraan Jerman yang demokratis dan pembatasan kekuasaan eksekutif untuk bertindak dapat terlihat juga terhadap kepengaturan St. Pauli FC. Penting juga untuk menyebutkan federalisme dan partisipasi negara bagian sebagai langkah perluasan partisipasi masyarakat terhadap kepengaturan dalam skala negara. Kebijakan-kebijakan yang terbentuk seperti *collective bargaining* para pekerja dan *public ownership* masyarakat terhadap perusahaan juga merupakan bentuk dominan dari bagaimana negara mengambil peran terhadap kapitalisme pasar bebas; sehingga prinsip kebebasan, keadilan, dan kesetaraan tetap dapat tercapai. Kebijakan lain seperti peraturan 50%+1 dari asosiasi sepak bola Jerman menjadi hasil dari hegemoni nilai dan norma pemerintahan sosial demokrasi Jerman; yang menjadi hasil dari perluasan nilai dan norma oleh dinamika yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan kepemilikan 50%+1 ini memiliki posisi yang penting dalam eksistensi St. Pauli FC melalui kesempatan pendukung untuk dapat berpartisipasi secara bebas, adil, dan setara dalam menjalankan klub tersebut.

St. Pauli FC berhasil hidup berdampingan dengan neoliberalisme yang ada di sepak bola modern. Klub ini membangun budaya komunitas yang mengakar kuat terlebih dahulu dibanding dengan pencapaian atas klub mereka. Budaya ini juga tidak serta merta terbangun atas sepak bola menjadi gerakan sosial; tetapi sepak bola yaitu St. Pauli FC yang bermarkas di distrik menjadi wadah untuk representasi masyarakat yang berada di distrik tersebut. Oleh karena itu, ketika keluar dari hal-hal persepakbolaan, masyarakat sekaligus pendukung atau penggemar St. Pauli FC tidak tercabut dari nilai-nilai yang mereka anut. Justru mereka tetap mengamalkannya di kehidupan sehari-hari masyarakat distrik St. Pauli. Oleh karena itu, St. Pauli FC juga dikenal sebagai klub sepak bola yang progresif dalam mengawal isu-isu sosial di sana; seperti halnya isu buruh, iklim, gender, dan isu anti-Nazisme di Jerman. Budaya ini yang kemudian menjadi konsensus bersama bagi mereka; meskipun mereka juga melegalisasi konsensus tersebut menjadi statuta St. Pauli FC sebagai pedoman mereka. Budaya alternatif mereka membuka ruang-ruang representasi bagi mereka yang menentang budaya dominan.

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Norma dan nilai dari demokrasi sosial berhasil membentuk mekanisme sosial yang lebih progresif. Baik itu dalam hal kenegaraan dari pemerintahan Jerman itu sendiri, maupun implementasi yang dilakukan oleh masyarakat Jerman dalam bersosial. Keberhasilan St. Pauli FC menjadi contoh dari terbukanya ruang representasi bagi mereka yang kerap kali terpinggirkan oleh negara atau budaya secara umum. Mekanisme tersebut tidak serta merta timbul begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dari hasil pergulatan buda ya-budaya di dekade sebelumnya; yang membuka peluang representasi pada masa kontemporer. Pergantian pemerintahan di Jerman tidak memutus nilai dan norma yang telah dianggap benar; atau telah terbentuk konsensus yang mengikat seluruh elemen masyarakat untuk menaatinya baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga atau organisasi yang berwenang mengatur jalannya kehidupan masyarakat. Internalisasi nilai dan norma tersebutlah yang menciptakan mekanisme sosial yang progresif.

4.2 Kontribusi Terhadap Hubungan Ilmu Internasional

Olahraga tidak dapat dipisahkan dari pertarungan politik sejak lama. Tak terkecuali dengan keadaan sepak bola kontemporer. Berawal dari olahraga kelas pekerja sebagai sarana rekreasi menjadi pertandingan kompetitif di masa ini. Perkembangan sepak bola sendiri tidak terlepas dari bagaimana keadaan politik ekonomi negara-negara di dunia. Pasar bebas yang kerap kali berhubungan hanya dengan kondisi ekonomi sebuah negara pada nyatanya turut mempengaruhi kelompok-kelompok seperti St. Pauli FC. Klub ini dapat bertahan di dunia komersial yang kompetitif dengan cara-cara alternatif; yang jarang terjadi di klub-klub dunia lainnya. St. Pauli FC juga menjalin hubungan dengan klub-klub yang sesuai dengan nilai mereka secara transnasional seperti Celtic FC di Skotlandia, FC Copenhagen di Denmark, Legia Warszawa di Polandia, dan Olympique Marseille di Perancis (McDougall, 2017). Menjadi bukti bahwa nilai-norma yang memiliki kemiripan di bidang sepak bola dapat menjadi landasan relasi bagi mereka yang ingin bergerak secara progresif.

Jauh dari itu, St. Pauli FC menjadi wadah bagi gerakan-gerakan seperti Greenpeace dan Amnesty Internasional. St. Pauli FC merupakan representasi bagi mereka yang ingin menyuarakan aspirasi mereka melalui komunitas yang ada di St. Pauli FC itu sendiri. Oleh karena itu, penyebaran nilai-nilai progresif tidak hanya dapat dilakukan oleh organisasi internasional pada umumnya, melainkan klub sepak bola seperti St. Pauli FC atau klub-klub mendatang yang memiliki nilai yang sama. St. Pauli FC mempromosikan nilai-nilai tersebut dengan menjadi tuan rumah di beberapa acara internasional seperti festival musik, konferensi perdamaian, dan beberapa aksi menuntut hak kesetaraan.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Referensi

Buku dan Jurnal

Acero, I., Serrano, R., & Dimitropoulos, P. (2017). *Ownership structure and financial performance in European football. Corporate Governance: The international journal of business in society, 17(3), 511-523.*

Berger, *S. (2014). Social Democracy and the Working Class: In Nineteenth-and Twentieth-Century Germany. Routledge.*

Bernstein, E., & Harvey, E. C. (1910). *Evolutionary Socialism.*

Brandt, C., & Hertel, F. (2015). German ultras as political players? An analysis of the protest against the 'Secure Stadium Experience'. *Miscellanea Anthropologica et Sociologica*, *16*(4), 64-82.

Daniel, P., & Kassimeris, C. (2013). The politics and culture of FC St. Pauli: From leftism, through anti-establishment, to commercialization. *Soccer & Society*, *14*(2), 167-182.

Drut, B., & Raballand, G. (2012). Why does financial regulation matter for European professional football clubs?. International Journal of Sport Management and Marketing 2, 11(1-2), 73-88.

Dubal, S. (2010). The neoliberalization of football: Rethinking neoliberalism through the commercialization of the beautiful game. International Review for the Sociology of Sport, 45(2), 123-146. https://doi.org/10.1177/1012690210362426

Evans, R. J. (1979). 'Red Wednesday'in Hamburg: Social democrats, police and Lumpenproletariat in the suffrage disturbances of 17 January 1906. *Social History*, *4*(1), 1-31.

Goulstone, J. (2000). The working-class origins of modern football. *The International Journal of the History of Sport*, *17*(1), 135-143.

Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks. International Publishers.

Griggs, G. (2012). 'Carlsberg don't make football teams… but if they did': the utopian reporting of FC St Pauli in the British media. *Soccer & Society*, *13*(1), 73-82.

Hayek, F. A. (1960). *The constitution of liberty: The definitive edition*. Routledge.

Hebdige, D. (2012). *Subculture: The meaning of style*. Routledge.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hesse-Lichtenberger, U. (2003). *Tor!: the story of German football*. WSC Books Limited.

Hoffmann, J. (2004). Co-ordinated Continental European Market Economies Under Pressure from Globalisation: Germany's "Rhineland capitalism". *German Law Journal*, *5*(8), 985-1002.

Hübler, O., & Jirjahn, U. (2003). *Works councils and collective bargaining in Germany: the impact on productivity and wages. Scottish Journal of Political Economy, 50(4), 471-491.*

Hunt, A. (2017). Rights and social movements: counter-hegemonic strategies. In *Law and social movements* (pp. 455-474). Routledge.

Irgali, C. (2022). *The Making of European Hegemonic Order: Hegemonic Struggles Through Football.* (Master's thesis, Middle East Technical University).

Jørgensen, M. B., & Makrygianni, V. (2020). A migrant's tale of two cities. *Commoning the City: Empirical Perspectives on Urban Ecology, Economics and Ethics*, 74.

Katz, H. C. (1993). *The decentralization of collective bargaining: a literature review and comparative analysis. Ilr Review, 47(1), 3-22.*

Kennedy, D., & Kennedy, P. (2018). Grass-roots football, autonomous activity and the forging of new social relationships. In *DIY Football* (pp. 95-111). Routledge.

Kuhn, G. (2019). *Soccer vs. the state: Tackling football and radical politics*. PM Press.

Laing, D. (1978). Interpreting punk rock. *Marxism Today*, *22*(4), 123-128.

Lewan, K. M. (1968). *The significance of constitutional rights for private law: theory and practice in West Germany. International & Comparative Law Quarterly, 17(3), 571-601.*

McDougall, W. (2017). Kicking from the left: The friendship of Celtic and FC St. Pauli supporters. In *Fan Culture in European Football and the Influence of Left Wing Ideology* (pp. 126-141). Routledge.

Meyer, T. (2005). *Theory of social democracy*. Springer-Verlag.

Meyer, T., & Turowski, J. (2006). Practice of social democracy. Springer Science & Business Media.

Ostrowski, M. S. (2018). *Eduard Bernstein on Social Democracy and International Politics: Essays and Other Writings.* Springer.

Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di
Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Perdana, K. E. (2016). Football as a Form of Political Communication for St. Pauli Football Club Supporters. *Jurnal Dinamika Global, 1*(02), 44-57.

Petroni, M. & Viccaro, E. (2015). *St. Pauli siamo noi: pirates, punks, and autonomi at the stadium and in the streets of Hamburg.* Rome: Castelvecchi.

Radoiu, R. D. (2019). Hegemony and Counter-Hegemony in Football. *Perspective Politice, 12*, 41.

Sachs, M. (2011). *Grundgesetz*. Beck, CH.

Schmidt, M. G. (2007). *The German political system: institutions, decision-making and policy areas*. CH Beck.

Striedieck, M. (2012). Causes, developments and consequences of gentrification processes-A case study of the urban district Hamburg-St. Pauli.

Totten, M. (2015). *Sport activism and political praxis within the FC Sankt Pauli fan subculture. Soccer & Society, 16(4), 453-468.*

Totten, M. (2018). Football and community empowerment: How FC Sankt Pauli fans organize to influence. In *Football, Community and Sustainability* (pp. 43-60). Routledge.

Viñas, C., Parra, N., & Stobart, L. (2020). *St. Pauli: another football is possible*. *Pluto Press*

Wagner, F., Schubert, M., Preuss, H., & Könecke, T. (2022). Competitive intensity in differently regulated men's football leagues: evidence from English premier league and German Bundesliga. *Sport, Business and Management: An International Journal*, *12*(5), 580-597.

Walvin, J. (2014). *The people's game: the history of football revisited*. Random House.

Artikel web

Ahsan, I. A., & Faisal, M. (2018). *St. Pauli, Klub Sepakbola Musuh Sejati Kaum Fasis*. tirto.id. https://tirto.id/st-pauli-klub-sepakbola-musuh-sejati-kaum-fasis-cJAU

Henderson, D. R. (2021). *German economic miracle*. Econlib. https://www.econlib.org/library/Enc/GermanEconomicMiracle.html

Cartledge, L. (2018). *FC St Pauli: How it became the football team of punk and techno*. The Guardian. https://www.theguardian.com/music/2018/jun/20/fc-st-pauli-how-it-became-the-football-team-of-punk-and-techno

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Olahraga Sebagai Sarana Representasi: Eksistensi St. Pauli FC pada Era Neoliberalisme Sepak Bola di Jerman
Wisnu Kurniawan, Dr. Muhammad Rum, IMAS
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Haasen, C. (2018, May 22). *FC St. Pauli: Antifascist, Antiracist*. Against the Current. https://againstthecurrent.org/atc194/antifa4/

Owen, D. R. (2019, May 12). *Forget liverpool. Hamburg, Germany, made the Beatles into the band they became*. Forget Liverpool. Hamburg, Germany, made the Beatles into the band they became. https://www.latimes.com/travel/la-tr-travel-beatles-hamburg-germany-20190512-story.html